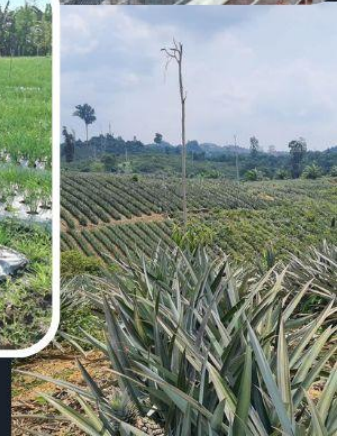
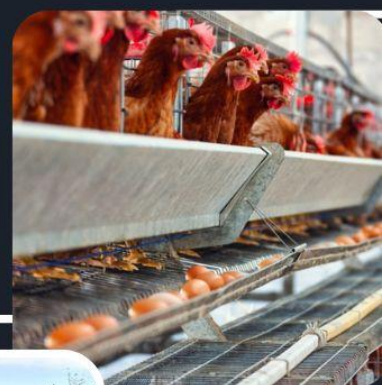




**DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

RENCANA STRATEGIS 2025-2029



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya akhirnya Rencana Strategik Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan.

Perencanaan Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur dalam rangka memfasilitasi pembangunan pertanian di Kabupaten Kutai Timur tahun 2025-2029 disusun sebagai salah satu acuan dalam merumuskan lebih lanjut langkah – langkah operasional yang terkait dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan pertanian dan peternakan.

Secara singkat dijelaskan tentang visi, misi, strategis, tujuan dan lingkungan strategis, sasaran, kebijakan dan program pembangunan pertanian dan peternakan serta matrik kegiatan tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan dalam rangka penyediaan pangan utama baik berasal dari padi, palawija, hortikultura maupun pangan asal hewan.

Kami menyadari bahwa penyajian Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu perlu saran dan masukan semua pihak untuk perbaikan lebih lanjut. Namun demikian diharapkan renstra ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi stakeholder, pemerintah, pelaku utama dan pelaku usaha serta lembaga lainnya.

Sangatta, 2025

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan Kabupaten
Kutai Timur



Ryali Ratnaningrum, S.Pt, M.Si
Pembina Tk.1 (IV/b)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu-isu	
Strategis Perangkat Daerah	10
2.1 Gambaran Pelayanan	10
2.1.1 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.1.3 Kondisi Umum dan Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	26
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan PD	37
2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	40
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	40
2.2.2 Isu Strategis	45
2.2.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	49
2.2.4 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Provinsi	57
2.2.5 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	64



Bab III. Tujuan dan Sasaran	67
3.1 Tujuan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	67
3.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	67
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	70
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	74
Bab IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan	78
4.1 Uraian Program	78
4.2 Uraian Kegiatan	78
4.3 Program Prioritas	127
4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	130
4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	132
Bab V. Penutup	135



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	11
Tabel 2. Daftar UPTD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	18
Tabel 3. ASN dan Non-ASN Tahun 2025	23
Tabel 4. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana	23
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 – 2024	27
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 – 2024	27
Tabel 7. Capaian Luas Tanam Komoditas Padi dan Palawija di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 - 2024	28
Tabel 8. Capaian Produksi Komoditas Padi dan Palawija di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 - 2024	29
Tabel 9. Capaian Produktivitas Komoditas Padi dan Palawija di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 - 2024	30
Tabel 10. Capaian Luas Tanam Sub Sektor Hortikultura di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021- 2024	31
Tabel 11. Capaian Produksi Sub Sektor Hortikultura di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 - 2024	32
Tabel 12. Capaian Produksi Daging Ternak Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 - 2024	33
Tabel 13. Capaian Populasi Ternak Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 - 2024	34
Tabel 14. Capaian Produksi Daging Unggas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 - 2024	35
Tabel 15. Capaian Populasi Unggas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 - 2024	36
Tabel 16. Rumusan Permasalahan Utama, Permasalahan dan Akar Masalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	41
Tabel 17. Isu Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	46
Tabel 18. Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih	52



Tabel 19. Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	69
Tabel 20. Analisis SWOT Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 - 2029	71
Tabel 21. Penahapan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 - 2029	72
Tabel 22. Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan	75
Tabel 23. Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	76
Tabel 24. Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur	81
Tabel 25. Indikasi Rencana Program dan Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	104
Tabel 26. Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	127
Tabel 27. Indikator Kinerja Kunci Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	129



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur	10
Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	16
Gambar 3. Grafik Capaian Luas Tanam Padi dan Palawija Tahun 2020 -2024	29
Gambar 4. Grafik Capaian Produksi Padi dan Palawija Tahun 2020 -2024	30
Gambar 5. Grafik Capaian Produktivitas Padi Tahun 2020 -2024	31
Gambar 6. Grafik Capaian Luas Tanam Sub Sektor Hortikultura Tahun 2020 – 2024	32
Gambar 7. Grafik Capaian Produksi Sub Sektor Hortikultura Tahun 2020 – 2024	33
Gambar 8. Grafik Capaian Produksi Daging Ternak 2020- 2024	34
Gambar 9. Grafik Capaian Populasi Ternak 2020- 2024	35
Gambar 10. Grafik Capaian Produksi Daging Unggas Ternak 2020- 2024	36
Gambar 11. Grafik Capaian Populasi Unggas 2020- 2024	37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah untuk periode lima tahun, sebagai landasan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Keberadaan Renstra PD memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur secara rinci tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta mekanisme penyusunan dan perubahan rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah di tingkat daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, Renstra PD berperan sebagai bagian integral dari proses penyusunan rancangan teknokratik maupun rancangan awal RPJMD dan Renja PD, sehingga menjamin keterkaitan hubungan vertikal-horisontal antar dokumen perencanaan dan antar tingkatan pemerintahan.

Renstra PD merupakan instrumen substantif yang memuat rumusan tujuan, sasaran, program, serta kegiatan pembangunan daerah yang mencerminkan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kebijakan perangkat daerah yang bersangkutan. Seluruh muatan dalam Renstra ini disusun secara indikatif dan berpedoman pada arah kebijakan RPJMD sebagai rujukan utama, guna memastikan keterpaduan perencanaan antar sektor dan konsistensi pembangunan lintas waktu. Renstra PD menjadi jembatan strategis antara kebijakan makro dalam RPJMD dan implementasi program secara operasional di tingkat perangkat daerah, yang berperan penting dalam menjamin akuntabilitas dan efektivitas pembangunan daerah.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai instrumen fundamental yang mengarahkan pelaksanaan urusan pemerintahan agar berjalan secara terencana, terpadu, dan terukur. Renstra menjadi pedoman strategis bagi perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus sebagai acuan dalam alokasi



sumber daya secara efisien dan efektif. Dokumen ini berperan penting dalam menyelaraskan prioritas sektoral dengan prioritas daerah secara keseluruhan, sehingga mencegah terjadinya fragmentasi kebijakan dan tumpang tindih antar sektor. Renstra juga berfungsi sebagai alat kontrol dan evaluasi kinerja melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan, yang memungkinkan monitoring capaian pembangunan secara periodik dan akuntabel. Keberadaan Renstra menjadi peta jalan yang menuntun perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pencapaian visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Fungsi Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur memastikan bahwa pembangunan di bidang pertanian (sektor tanaman pangan dan hortikultura) dan peternakan berjalan searah dengan prioritas nasional maupun daerah. Renstra ini menjadi instrumen pengarah untuk merancang program yang berorientasi pada peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi komoditas hortikultura, serta pengembangan peternakan rakyat yang berdaya saing. Melalui Renstra, strategi pembangunan pertanian dan peternakan tidak hanya disusun secara teknokratik, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi petani dan peternak sebagai pelaku utama sektor ini. Renstra memungkinkan integrasi antara kebijakan makro dengan kebutuhan riil masyarakat pertanian, sekaligus menjadi alat navigasi bagi dinas dalam mewujudkan transformasi pertanian yang modern, berkelanjutan, dan berbasis kawasan.

Penyusunan Renstra perangkat daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang menegaskan bahwa setiap unsur penyelenggara pemerintahan wajib menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Amanat tersebut diperjelas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun Renstra yang



selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sistematis yang mencerminkan prinsip partisipatif, integratif, dan akuntabel. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tahapan tersebut meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah atau lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, hingga tahap penetapan. Pada fase persiapan, Perangkat Daerah terlebih dahulu menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah mengenai pembentukan tim penyusun Renstra, melakukan orientasi substansial terhadap penyusunan Renstra, menyusun agenda kerja tim, serta menyiapkan basis data dan informasi pembangunan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tahapan awal menjadi dasar akurasi proses perencanaan selanjutnya. Sepanjang proses penyusunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur berkoordinasi dengan Bappeda serta pemangku kepentingan lainnya guna memastikan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan, baik secara horizontal antar sektor maupun secara vertikal dengan arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal secara simultan dengan proses penyusunan rancangan awal RPJMD, sehingga menjamin keterpaduan dan keselarasan arah kebijakan pembangunan. Penyusunan ini mencakup serangkaian analisis, mulai dari gambaran pelayanan, identifikasi permasalahan dan isu strategis, hingga penelaahan dokumen perencanaan yang telah ada. Selanjutnya, dirumuskan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dalam rancangan awal RPJMD. Rancangan awal tersebut kemudian dibahas melalui forum Perangkat Daerah atau lintas Perangkat Daerah bersama pemangku kepentingan guna memperoleh masukan, klarifikasi, dan penajaman terhadap program, kegiatan, serta kelompok dan lokasi sasaran. Hasil pembahasan ini dituangkan secara formal dalam bentuk berita acara dan menjadi dasar penyempurnaan substansi rancangan awal. Rancangan awal



Renstra PD merupakan instrumen verifikasi oleh BAPPEDA terhadap konsistensi dan kesesuaian Renstra Perangkat Daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Setelah itu, menindaklanjuti rancangan awal Renstra dengan perumusan rancangan akhir. Tahap ini untuk mempertajam dan mengkonsolidasikan arah kebijakan, strategi, program, serta kegiatan Perangkat Daerah agar sepenuhnya selaras dengan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah. Perumusan rancangan akhir Renstra dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan penajaman substansi, baik dari aspek target kinerja, indikator pencapaian, maupun integrasi program lintas sektor. Penyempurnaan ini bertujuan agar Renstra relevan secara sektoral dan berkontributif dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang bersifat holistik, tematik, integratif, dan spasial, sehingga penyusunannya harus mengacu dan terintegrasi secara vertikal maupun horizontal dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Secara vertikal, Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian sebagai bagian dari kerangka kebijakan sektoral nasional, Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai representasi pembangunan wilayah yang lebih luas, serta RPJMD Kabupaten Kutai Timur. Hal ini bertujuan agar prioritas pembangunan daerah dalam sektor pertanian, hortikultura, dan peternakan tetap berada dalam koridor sinergitas antar level pemerintahan, sekaligus menjamin keterpaduan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah nasional dan daerah. Lebih lanjut, secara horizontal, Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan fundamental bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, dengan fungsi sebagai dokumen penjabaran program dan kegiatan lima tahunan ke dalam tahapan perencanaan tahunan yang lebih operasional dan terukur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur yaitu:



1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata



Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur 2015-2035;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur 2025-2029;



16. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Perda Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 adalah untuk mengoperasionalkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur di bidang pertanian dan peternakan sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Tujuan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 adalah untuk mendukung sinergi pembangunan jangka menengah antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, serta penguatan ekonomi lokal berbasis potensi sumber daya pertanian dan peternakan daerah. Selain itu, Renstra ini mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, penerapan teknologi, dan penguatan kelembagaan petani melalui perencanaan pembangunan yang efisien, inklusif, dan berorientasi pada daya saing serta keberlanjutan sektor pertanian di Kutai Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I.	PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II.	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU



BAB III.	STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	2.1 Gambaran Pelayanan
	2.1.1 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.1.3 Kondisi Umum dan Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan PD
	2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2.2 Isu Srategis
	2.2.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	2.2.4 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Provinsi
	2.2.5 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1 Tujuan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	3.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rensttra Perangkat Daerah
	3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN
	4.1 Uraian Kegiatan



BAB IV.	4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
	4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BAB V.	PENUTUP



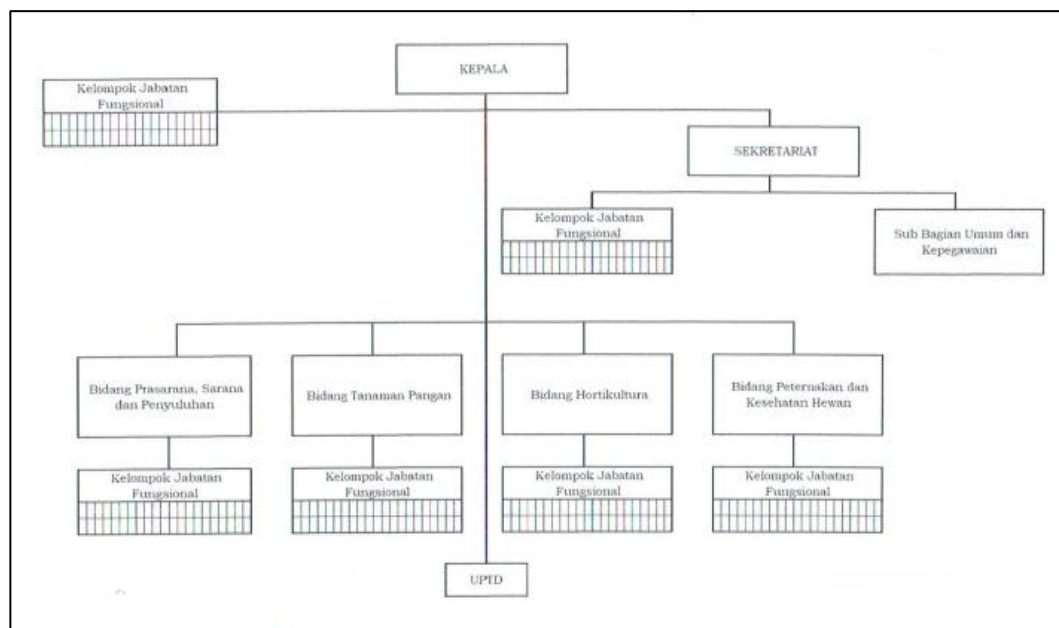
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

2.1 GAMBARAN PELAYANAN

2.1.1 Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang disebut juga DTPHP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai komposisi struktur sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur

Sumber: Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 25 Tahun 2023

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
4. Bidang Tanaman Pangan



5. Bidang Hortikultura
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
7. UPTD
8. Jabatan Fungsional

Tabel 1. Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Kabupaten Kutai Timur

Jabatan	Uraian Tugas	Fungsi
Kepala Dinas	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; 2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; 3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; 4. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; 5. Pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.
Sekretaris	Memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata	1. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; 2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan 3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;



Jabatan	Uraian Tugas	Fungsi
	usah, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.	4. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Persuratan 2. Tata usaha 3. Kearsipan 4. Administrasi ASN 5. Perlengkapan 6. Rumah tangga 7. Penataan barang milik daerah	1. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan urusan rumah tangga dan administrasi perjalanan dinas 2. Pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset 3. Penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku 4. Pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Pengkoordinasian urusan keprotokolan 6. Penatausahaan kepegawaian
Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan.	1. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan 2. Penyusunan program pertanian dan peternakan 3. Penyusunan dukungan infrastruktur pertanian dan peternakan



Jabatan	Uraian Tugas	Fungsi
		- Pemberian bimbingan pembiayaan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian - Pemberian fasilitasi investasi pertanian dan peternakan - Pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian dan peternakan - Pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian dan peternakan - Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
Kepala Bidang Tanaman Pangan	Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan	- Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan - Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan - Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan - Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan - Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak



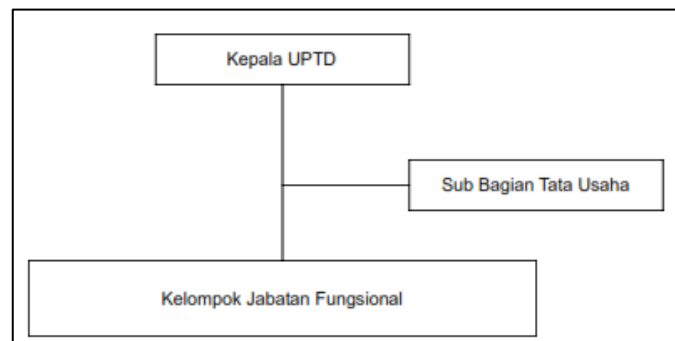
Jabatan	Uraian Tugas	Fungsi
		perubahan iklim di bidang tanaman pangan 6. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan 7. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan 8. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
Kepala Bidang Hortikultura	Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura	1. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura 2. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura 3. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang hortikultura 4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura 5. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura 6. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan



Jabatan	Uraian Tugas	Fungsi
		pemasaran hasil di bidang hortikultura 7. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura 8. Pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan	1. Penyusunan kebijakan pembibitan, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan 2. Pengelolaan sumber daya genetik hewan 3. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak 4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak 5. Pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 6. Pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan 7. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan



Jabatan	Uraian Tugas	Fungsi
		8. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan 9. Pemberian izin usaha/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 10. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil bidang peternakan 11. Pemantauan dan evaluasi bidang peternakan dan kesehatan hewan 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas



Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Sumber: *Perbup Kutai Timur Nomor 40 Tahun 2023*

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur meliputi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Balai Benih Hortikultura; Rumah Potong Hewan (RPH); serta Balai Benih



dan Palawija yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur. Organisasi dan tata kerja UPT ini diatur dalam tiga Peraturan Bupati: Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur; Nomor 23 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan; dan Nomor 11 Tahun 2017 yang mencakup Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Padi dan Palawija, Balai Benih Hortikultura, serta Rumah Potong Hewan di Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur. Susunan organisasi di setiap UPT terdiri atas:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional



Tabel 2. Daftar UPTD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur

UPTD	Unit Kerja	Tugas Pokok	Fungsi
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	1. Batu Ampar 2. Bengalon 3. Busang 4. Kaliorang 5. Karangan 6. Kaubun 7. Kombeng 8. Long Mesangat 9. Muara Ancalong 10. Muara Bengkal 11. Muara Wahau 12. Rantau Pulung 13. Sandaran 14. Sangatta Selatan 15. Sangatta Utara 16. Sangkulirang	Sebagai pelaksana kegiatan penyuluhan di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh Koordinator Penyuluh Pertanian.	1. Menyusun dan melaksanakan program penyuluhan pertanian untuk seluruh kecamatan yang ada di daerah sejalan dengan program penyuluhan pertanian pada dinas; 2. Menyediakan dan menyebarkan informasi terkait teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar bidang pertanian serta mendukung peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan, dan kualitas konsumsi pangan; 3. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian, serta Posluhdes;



UPTD	Unit Kerja	Tugas Pokok	Fungsi
	17. Telen 18. Teluk Pandan		4. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; 5. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan 6. Mengembangkan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal.
Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	1. Bengalon 2. Kaliorang 3. Kombeng 4. Long Mesangat 5. Rantau Pulung 6. Teluk Pandan	Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan reproduksi ternak di wilayah kerja	1. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, dan penanggulangan penyakit hewan/ternak; 2. Pelaksanaan bimbingan pada petani dalam pengendalian penyakit hewan/ternak; 3. Pelaksanaan pemetaan penyakit hewan/ternak dan epidemiologi;



UPTD	Unit Kerja	Tugas Pokok	Fungsi
			4. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah penyakit hewan; 5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; 6. Pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi ternak; 7. Pelaksanaan pelaporan situasi penyakit dan perkembangan populasi hewan/ternak; 8. Pelaksanaan penyebaran dan perguliran ternak pemerintah.
Balai Benih Padi dan Palawija	Kaliorang	Melaksanakan urusan teknis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan di bidang pelayanan benih padi dan palawija	1. Menyusun rencana kerja UPT Balai Benih Padi dan Palawija; 2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional balai benih padi dan palawija; 3. Pelaksanaan teknis, pendeteksian hama dan penyakit, pengendalian dan pengawasan benih padi dan palawija; 4. Pengelolaan dan pembinaan pada



UPTD	Unit Kerja	Tugas Pokok	Fungsi
			penangkar benih masyarakat petani terhadap pelayanan benih padi dan palawija; 5. Pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan balai benih padi dan palawija; 6. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
Rumah Potong Hewan	Sangatta Utara	Melaksanakan urusan teknis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan di bidang pelayanan pemotongan hewan ternak.	1. Menyusun rencana kerja UPT Rumah Potong Hewan; 2. Pelaksanaan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah dipotong untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia; 3. Pemotongan hewan dan penanganan daging; 4. Pelaksanaan pendeteksian penyakit hewan yang ditemukan guna pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular di daerah asal;



UPTD	Unit Kerja	Tugas Pokok	Fungsi
			5. Pelaksanaan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif; 6. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian proses pemotongan hewan di luar rumah potong hewan; 7. Pengelolaan dan pemanfaatan limbah padat dan limbah cair yang berada di Rumah Potong Hewan; 8. Pengelolaan urusan ketatausahaan; 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus sesuai dengan kebutuhan. Sumberdaya aparatur (ASN/NON-ASN) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada tahun 2025 sebanyak 602 orang yang terdiri dari a) ASN sebanyak 582 orang dan b) NON-ASN sebanyak 19 orang. Komposisi ASN/NON-ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. ASN dan NON-ASN Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Kabupaten Kutai Timur di Seluruh Kecamatan

NO	GOLONGAN	MAGISTER		SARJANA		DIPLOMA		SMA DAN SEDERAJAT		SMP DAN SEDERAJAT		SD DAN SEDERAJAT		JUMLAH		TOTAL
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	
1	Golongan IV	6	4	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
2	Golongan III	11	5	71	101	-	2	6	12	-	-	-	-	-	-	208
3	Golongan II	-	-	-	-	2	3	5	22	-	-	-	-	-	-	32
4	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3
5	Golongan IX	-	-	107	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208
6	Golongan VII	-	-	-	-	11	18	-	-	-	-	-	-	-	-	29
7	Golongan V	-	-	-	-	-	-	48	59	-	-	-	-	-	-	107
8	TK2D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	JUMLAH	17	9	180	205	13	23	59	95	-	1	1	-	-	-	602
	TOTAL	26		385		36		153		1		1		-		602

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagaimana tabel di bawah :



Tabel 4. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Satuan	Jumlah Sampai Dengan Tahun 2025	Keterangan			
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Tidak Ditemukan
1	Kendaraan Roda 4	Unit	9	4	0	5	0
2	Kendaraan Roda 3	Unit	1	1	0		0
3	Kendaraan Roda 2	Unit	456	394	28	20	14
4	Personal Computer (PC)	Unit	125	106	8	7	4
5	Laptop / Notebook	Unit	277	237	6	5	29
6	Tablet	Unit	7	0	0	0	0
7	Mesin Ketik	Unit	25	15	1	4	5
8	Printer	Unit	165	134	8	13	10
9	Audio Visual (TV+DVD)	Unit	23	8	1	6	8
10	Air Conditioner (AC)	Unit	59	41	7	11	0
11	Kipas Angin	Unit	40	21	12	6	1
12	Mesin Generator	Unit	20	7	3	1	9
13	Handycam/Camera Vidio	Unit	17	2	3	1	11
14	Telepon	Unit	0	0	0	0	0
15	Global Positioning System (GPS)	Unit	65	34	0	0	31
16	Paper Shredder(Mesin Penghancur Kertas)	Unit	20	16	2	2	0
17	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Unit	18	3	9	6	0
18	Kulkas	Unit	19	5	8	2	0
19	Sound System	Unit	42	32	5	5	0
20	Alat Laboratorium	Unit	41	23	1	0	17
21	Alat Pencacah	Unit	7	0	0	0	7



No	Uraian	Satuan	Jumlah Sampai Dengan Tahun 2025	Keterangan			
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Tidak Ditemukan
22	Alat Pengolahan	Unit	14	0	0	0	14
23	Alat Pengukur Tanah	Unit	5	1			4
24	Alat Pengukur Air	Unit	0	0	0	0	0
25	Papan tenis meja	Unit	2	2	0	0	0
26	Kamera	Unit	19	2	3	1	13
27	Hard Disk External	Unit	28	27	0	1	0
28	Alat Keju Hewan Ternak (Sapi)	Unit	1	0	0	0	1
29	Filling Kabinet	Unit	34	7	19	8	0
30	Lemari Besi	Unit	61	45	7	9	0
31	Lemari Kayu	Unit	10	0	3	7	0
32	Rak Besi	Unit	14	14	0	0	0
33	Rak Kayu	Unit	3	0	2	1	0
34	CCTV	Unit	30	30	0	0	0
35	Microphone Dynamic (Kabel/Baterai)	Unit	5	5	0	0	0
36	Microphone Wireless	Unit	5	5	0	0	0
37	Kunci Pas	Set	1	1	0	0	0
38	Layar Proyektor	Unit	10	5	3	1	1
39	Liquid N2 Container	Unit	20	20	0	0	0
40	Mesin Pemotong Rumput	Unit	32	18	10	1	3
41	Meja Kerja	Unit	485	351	78	56	0
42	Kursi Kerja	Unit	976	891	13	72	0
43	Meja kaca	Unit	0	0	0	0	0
44	Pompa Air	Unit	32	8	6		18
45	Tiang Bendera	Unit	2	2	0	0	0
46	Wireless	Unit	2	0	2	0	2



No	Uraian	Satuan	Jumlah Sampai Dengan Tahun 2025	Keterangan			
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Tidak Ditemukan
47	Dispenser	Unit	2	2	0	0	0
48	Drone	Unit	4	4	0	0	0
49	Kalkulator	Unit	4	4	0	0	0
50	Scanner	Unit	35	29	1	0	5
51	Senter	Unit	3	3	0	0	0
52	Sofa	Unit	8	1	7	0	0
53	Troli	Unit	5	4	0	1	0
54	Mesin Handling	Unit	1	0	0	1	0
55	Brankas	Unit	2	0	0	1	1
56	Forklift	Unit	1	1	0	0	0
57	Tempat Pel	Unit	4	4	0	0	0
58	Dry Vacuum Cleaner	Unit	4	4	0	0	0

Sumber : Bagian Aset Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

2.1.3 Kondisi Umum dan Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Kinerja pelayanan Perangkat Dinas (PD) dapat dilihat dari gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan PD sebagai penjabaran keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja Dinas Pertanian bisa di ukur indikator kinerjanya. Hal ini merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.



Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 – 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target				Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	
Produksi Komoditas Tanaman Pangan	Ton	28.244,20	38.677,53	26.874,75	29.772,77	29.772,77
Produktivitas Padi	Ton/Ha	3,5	4,4	4,61	4,86	4,86
Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura	Ton	35300	82906	114640	106347	106347
Produksi sektor peternakan	Ton	3911,3	5372,2	1571	3688	3688

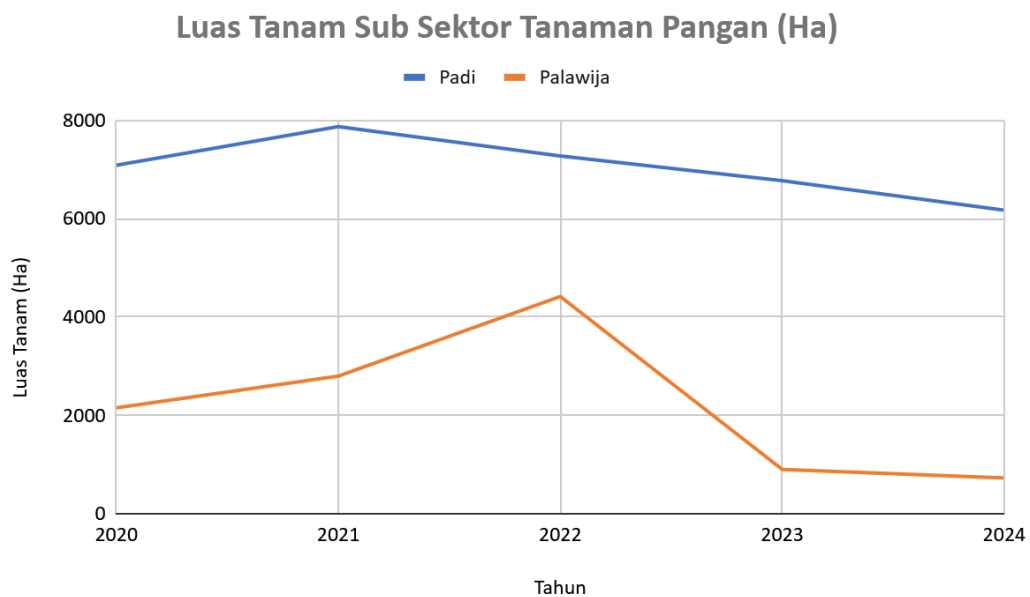
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 – 2024

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian			Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	36,93	-30,51	10,78	10,78
Peningkatan Produksi Hortikultura	%	134,86	38,27	-7,23	-7,23
Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	37,35	-70,75	134	134
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari PHMS)	%	100	100	100	100



Tabel 7. Capaian Luas Tanam Komoditas Padi dan Palawija di Kabupaten Kutai Timur 2021–2024
(Ton)

No	Jenis Komoditas	Luas Tanam Sub Sektor Tanaman Pangan (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	7,085.40	7,870.50	7,273	6,770.08	6,171.62
2	Palawija	2,151	2,797	4,415.40	898.41	725.11



Gambar 3. Grafik Capaian Produksi Komoditas Padi dan Palawija Tahun 2021 - 2024

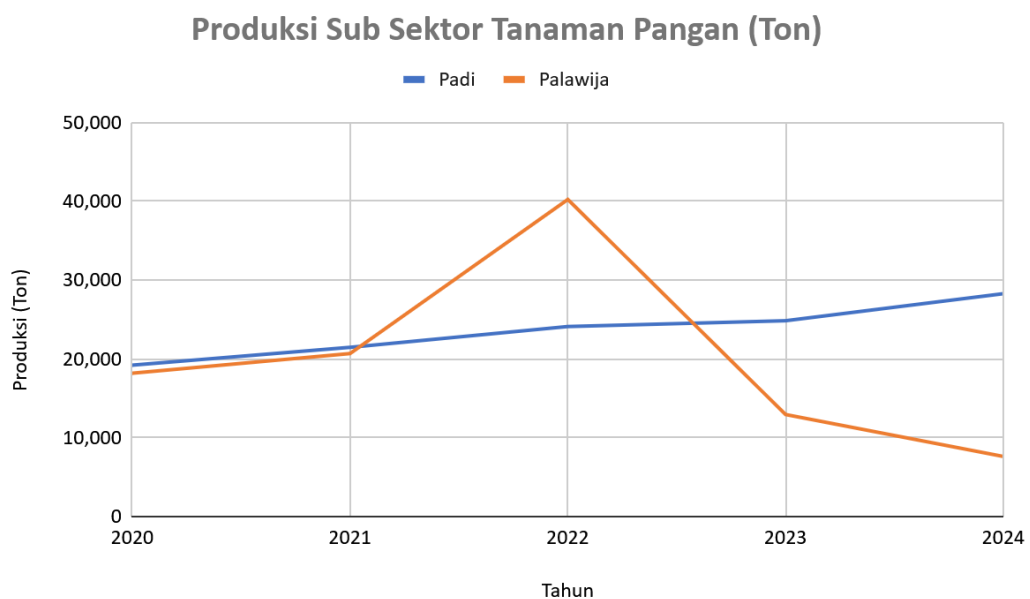
Sumber : Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, 2024

Data luas tanam subsektor tanaman pangan Kabupaten Kutai Timur tahun 2020–2024 menunjukkan tren menurun pada dua komoditas utama, yaitu padi dan palawija. Luas tanam padi menurun dari 7.870,50 Ha (2021) menjadi 6.171,62 Ha (2024), sedangkan palawija turun tajam dari 4.415,40 Ha (2022) menjadi 725,11 Ha (2024). Penurunan ini mencerminkan tantangan dalam ketersediaan lahan dan faktor cuaca, sehingga diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas melalui intensifikasi, penyediaan sarana produksi, dan penguatan peran penyuluh pertanian.



Tabel 8. Capaian Produksi Komoditas Padi dan Palawija di Kabupaten Kutai Timur 2021–2024
(Ton)

No	Jenis Komoditas	Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	19,209	21,470.20	24,110.53	24,843.89	28,273.43
2	Palawija	18,182	20,673.80	40,226.89	12,937.20	7,612.31



Gambar 4. Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan (Ton)

Sumber : Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, 2024

Data produksi subsektor tanaman pangan Kabupaten Kutai Timur tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan pada komoditas padi, namun fluktuatif dan menurun pada palawija. Produksi padi meningkat dari 19.209 ton (2020) menjadi 28.273,43 ton (2024), menunjukkan adanya perbaikan produktivitas meskipun luas tanam mengalami penurunan. Sebaliknya, produksi palawija sempat melonjak hingga 40.226,89 ton (2022), namun kemudian turun tajam menjadi 7.612,31 ton (2024). Kondisi ini menggambarkan adanya ketidakkonsistenan produksi palawija akibat faktor cuaca dan ketersediaan lahan.



Tabel 9. Capaian Produktivitas Komoditas Padi dan Palawija di Kabupaten Kutai Timur, 2021–2024 (Ton/Ha)

No	Jenis Komoditas	Produktivitas Sub Sektor Tanaman Pangan (Ton/Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	3.5	3.5	4.4	4.61	4.86

Sumber : Bidang Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, 2024



Gambar 5. Grafik Capaian Produktivitas Komoditas Padi Tahun 2021 - 2024

Sumber : Bidang Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, 2024

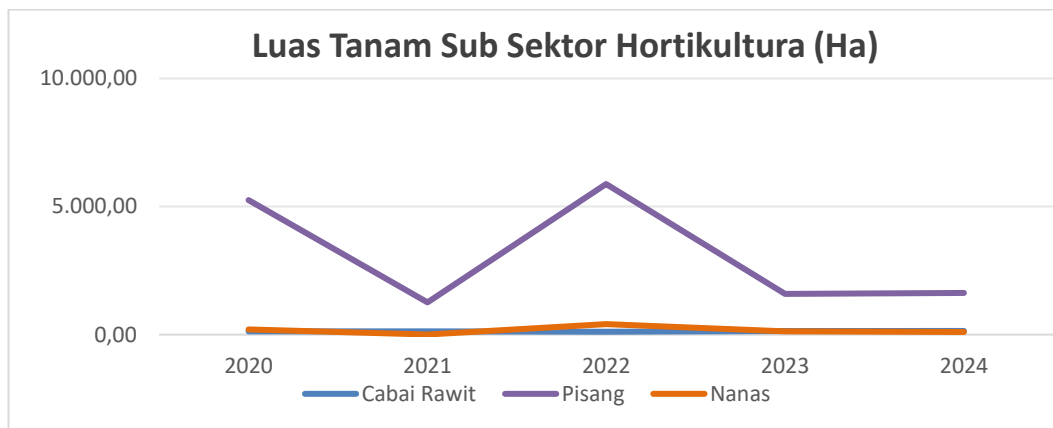
Data produktivitas subsektor tanaman pangan Kabupaten Kutai Timur menunjukkan tren peningkatan pada komoditas padi selama periode 2020–2024. Produktivitas padi meningkat dari 3,5 ton/Ha pada tahun 2020–2021 menjadi 4,4 ton/Ha pada tahun 2022, dan terus naik hingga 4,86 ton/Ha pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam teknik budidaya, penggunaan varietas unggul, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian yang lebih baik. Meskipun luas tanam cenderung menurun, peningkatan produktivitas menjadi indikator positif terhadap efektivitas program intensifikasi pertanian dan peran aktif penyuluh dalam meningkatkan kemampuan petani.



Tabel 10. Capaian Luas Tanam Sub Sektor Hortikultura di Kabupaten Kutai Timur, 2021–2024 (Ton)

No		Luas Tanam Sub Sektor Hortikultura (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cabai Rawit	121,00	130,05	112,78	142,06	142,42
2	Pisang	5.247,08	1.258,43	5.880,17	1.589,17	1.624,91
3	Nanas	196,31	4,20	409,10	126,52	106,27

Sumber : Bidang Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, 2024



Gambar 6. Grafik Capaian Luas Tanam Sub Sektor Hortikultura Tahun 2021 - 2024

Sumber : Bidang Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, 2024

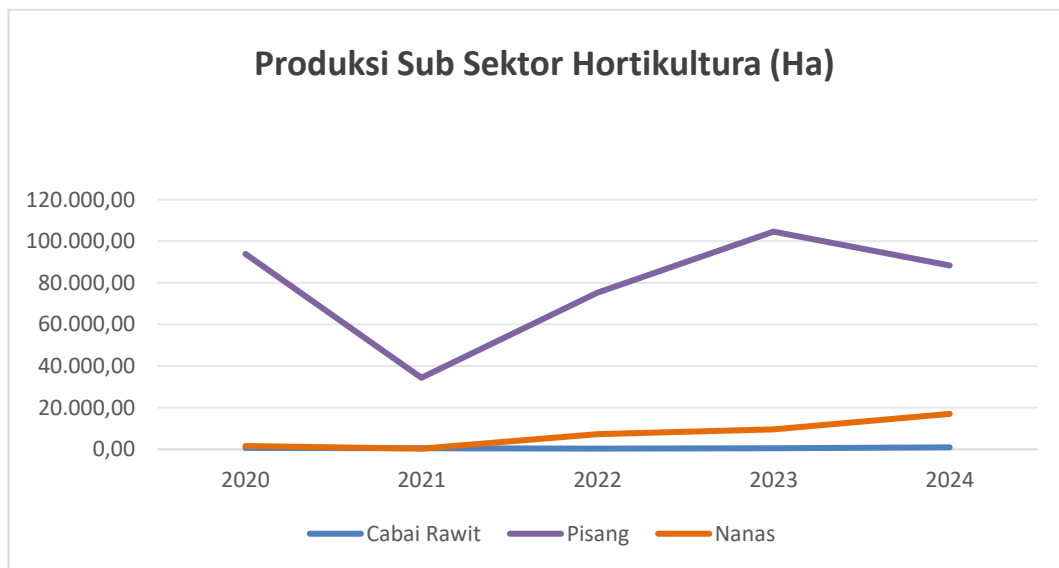
Capaian luas tanam sub sektor hortikultura di Kabupaten Kutai Timur periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi pada beberapa komoditas utama, yaitu cabai rawit, pisang, dan nanas. Luas tanam cabai rawit cenderung stabil dengan peningkatan kecil dari 121,00 ha pada tahun 2020 menjadi 142,42 ha pada tahun 2024, menandakan adanya konsistensi dalam pengembangan komoditas ini. Sementara itu, pisang mengalami fluktuasi signifikan, dengan penurunan tajam pada 2021 kemudian meningkat kembali di 2022 sebelum stabil di kisaran 1.600 ha pada 2024. Adapun nanas menunjukkan pola serupa, di mana terjadi penurunan pada 2021 lalu kembali meningkat pada 2022 dan sedikit menurun di tahun-tahun berikutnya. Perubahan terjadi karena adanya dinamika dalam pengelolaan komoditas hortikultura yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, ketersediaan sarana produksi, serta kebijakan pengembangan tanaman unggulan daerah



Tabel 11. Capaian Produksi Sub Sektor Hortikultura di Kabupaten Kutai Timur, 2021–2024 (Ton)

No		Produksi Sub Sektor Hortikultura (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cabai Rawit	611,40	579,71	343,64	466,22	951,81
2	Pisang	93.826,10	34.378,90	75.216,18	104.612,80	88.358,29
3	Nanas	1.608,17	341,30	7.345,73	9.560,66	17.036,56

Sumber : Bidang Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, 2024



Gambar 7. Grafik Capaian Produksi Sub Sektor Hortikultura Tahun 2021 - 2024

Sumber : Bidang Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, 2024

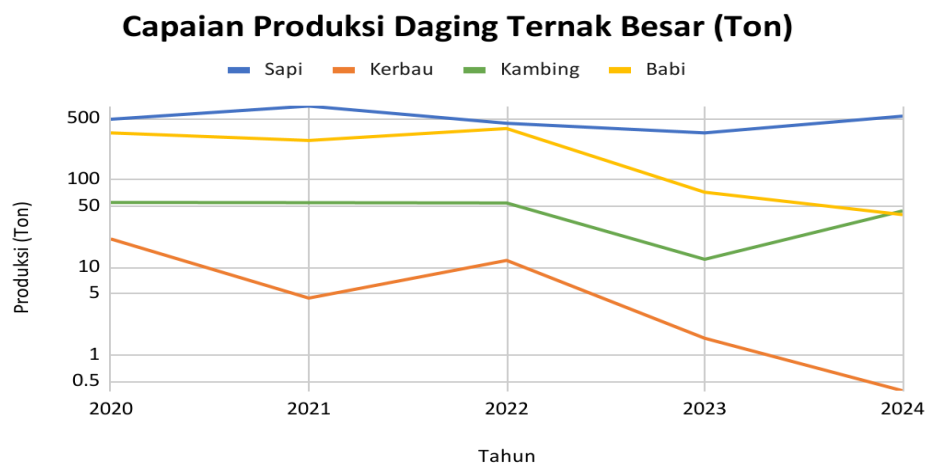
Capaian produksi hortikultura menunjukkan tren yang berfluktuasi untuk ketiga komoditas utama, yaitu cabai rawit, pisang, dan nanas. Luas tanam cabai rawit relatif stabil dengan peningkatan dari 121,00 Ha pada tahun 2020 menjadi 142,42 Ha pada tahun 2024, menandakan komoditas ini tetap menjadi prioritas hortikultura daerah. Sementara itu, pisang mengalami fluktuasi yang cukup tajam, menurun dari 5.247,08 Ha pada 2020 menjadi 1.258,43 Ha pada 2021, kemudian meningkat kembali hingga 5.880,17 Ha pada 2022 sebelum turun stabil di kisaran 1.624,91 Ha pada 2024. Kondisi serupa terjadi pada nanas, yang sempat menurun drastis pada 2021 kemudian naik pada 2022 dan sedikit menurun kembali pada tahun-tahun berikutnya. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam pengembangan komoditas hortikultura, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi iklim, ketersediaan bibit unggul, serta perubahan pola tanam petani.



Tabel 12. Capaian Produksi Daging Ternak di Kabupaten Kutai Timur, 2021–2024 (Ton)

No	Jenis Ternak	Capaian Produksi Daging Ternak Besar (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi	488.84	691.37	439.66	341.67	530.49
2	Kerbau	21.06	4.45	11.98	1.55	0.39
3	Kambing	54.95	54.63	54.18	12.33	44
4	Babi	341.71	279.99	383.19	71.86	39.87

Sumber : Bidang Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, 2024



Gambar 8. Grafik Capaian Produksi Daging Ternak di Kabupaten Kutai Timur 2021-2024

Sumber : Bidang Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, 2024

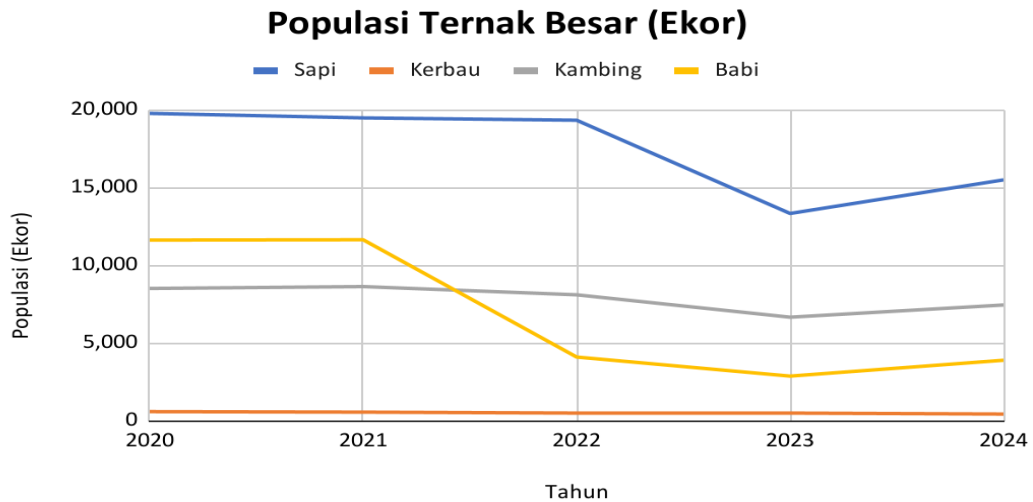
Data pada tabel dan grafik menunjukkan bahwa produksi daging ternak besar di Kabupaten Kutai Timur tahun 2020–2024 mengalami fluktuasi. Produksi daging sapi cenderung stabil dengan sedikit penurunan pada 2023, namun kembali meningkat pada 2024. Produksi daging kerbau dan babi mengalami penurunan tajam terutama setelah 2022, sedangkan produksi kambing sempat turun di 2023 dan kembali naik pada 2024. Secara umum, sapi tetap menjadi penyumbang utama produksi daging, sementara komoditas lainnya menunjukkan ketidakstabilan produksi dari tahun ke tahun.



Tabel 13. Capaian Populasi Ternak di Kabupaten Kutai Timur, 2021 -2024 (Ekor)

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak Besar (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi	19,775	19,486	19,336	13,333	15,496
2	Kerbau	573	541	479	479	417
3	Kambing	8,505	8,625	8,096	6,654	7,440
4	Babi	11,620	11,640	4,089	2,860	3,882

Sumber : Bidang Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, 2024



Gambar 9. Grafik Capaian Populasi Ternak di Kabupaten Kutai Timur 2021-2024

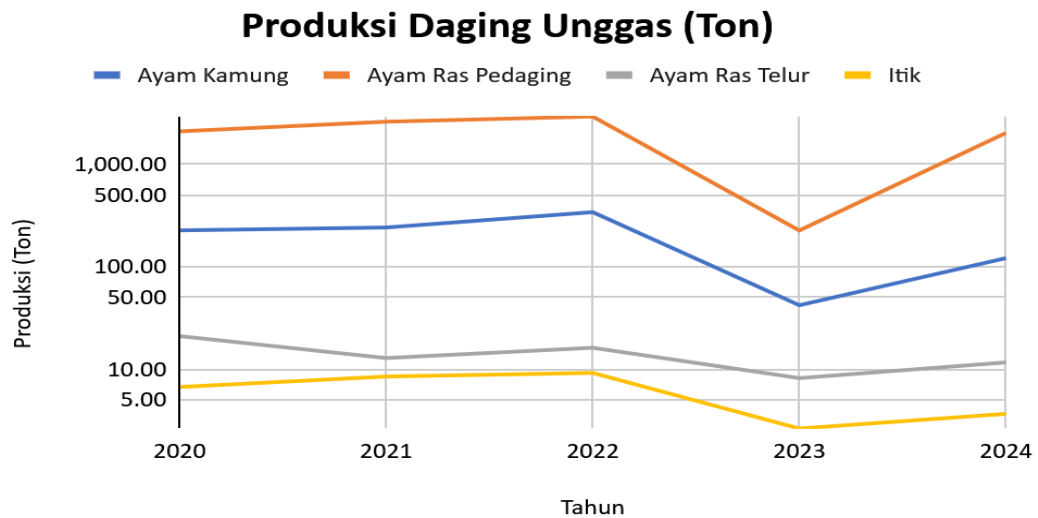
Sumber : Bidang Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, 2024

Data pada tabel dan grafik menunjukkan bahwa populasi ternak besar di Kabupaten Kutai Timur tahun 2020–2024 mengalami penurunan pada sebagian besar jenis ternak. Populasi sapi menurun signifikan pada tahun 2023, namun sedikit meningkat kembali di 2024. Populasi kambing juga menunjukkan tren menurun, meskipun masih relatif stabil dibandingkan ternak lainnya. Sementara itu, populasi kerbau dan babi mengalami penurunan tajam, terutama babi yang turun drastis sejak 2022. Secara keseluruhan, populasi ternak besar di Kutai Timur cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kasus penyakit hewan, tingkat kelahiran, angka kematian ternak, serta pemotongan hewan.



Tabel 14. Capaian Produksi Daging Unggas di Kabupaten Kutai Timur 2021-2024 (Ton)

No	Jenis Ternak	Produksi Daging Unggas (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ayam Kampung	226.63	241.80	341.26	42.08	121.35
2	Ayam Ras Pedaging	2,105.44	2,617.75	2,939.20	226.57	2,033.48
3	Ayam Ras Telur	21.05	12.84	16.19	8.19	11.65
4	Itik	6.69	8.47	9.19	2.63	3.66



Gambar 10. Grafik Capaian Populasi Unggas di Kabupaten Kutai Timur 2021-2024

Sumber : Bidang Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, 2024

Data pada tabel dan grafik menunjukkan bahwa produksi daging unggas di Kabupaten Kutai Timur tahun 2020–2024 mengalami fluktuasi. Produksi tertinggi berasal dari ayam ras pedaging yang sempat meningkat signifikan hingga tahun 2022, namun turun tajam pada 2023 sebelum kembali naik di 2024. Produksi ayam kampung juga menunjukkan pola serupa dengan peningkatan pada 2022 dan penurunan pada 2023. Sementara itu, produksi ayam ras petelur dan itik cenderung rendah dan relatif stabil. Secara keseluruhan, tren produksi unggas menunjukkan ketergantungan besar pada ayam ras pedaging sebagai penyumbang utama daging unggas di Kutai Timur. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kasus penyakit hewan, tingkat kelahiran, dan angka kematian ternak.

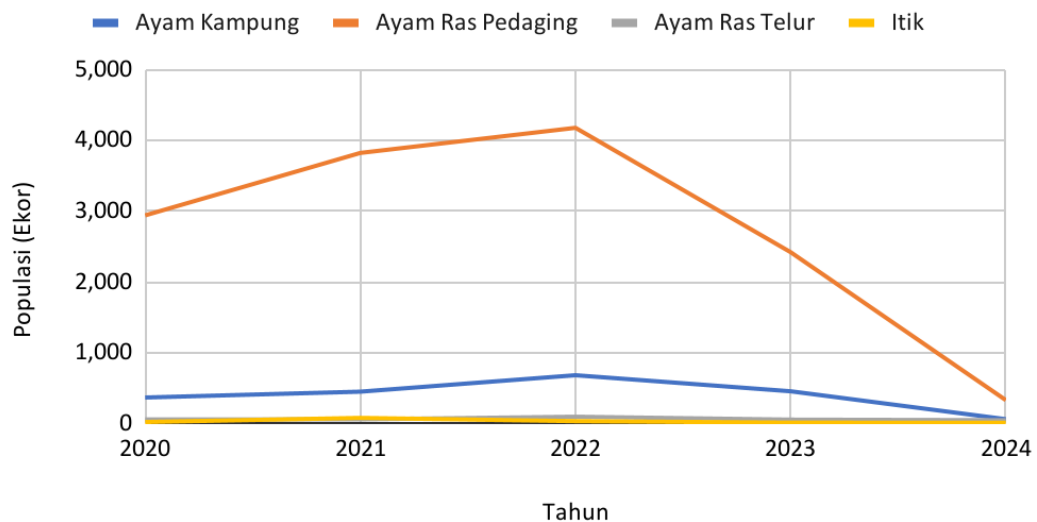


Tabel 15. Capaian Populasi Unggas di Kabupaten Kutai Timur 2021-2024 (Ekor)

No	Jenis Unggas	Populasi Unggas (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ayam Kampung	371,067	453,662	685,920	459,145	64,816
2	Ayam Ras Pedaging	2,944,750	3,826,782	4,181,452	2,424,481	334,514
3	Ayam Ras Telur	60,445	63,000	99,561	58,503	50,197
4	Itik	24,863	82,883	37,444	15,623	14,176

Sumber : Bidang Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, 2024

Populasi Unggas (Ekor)



Gambar 11. Grafik Capaian Populasi Unggas di Kabupaten Kutai Timur 2021-2024

Sumber : Bidang Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, 2024

Data pada tabel dan grafik menunjukkan perkembangan populasi unggas di Kabupaten Kutai Timur selama periode 2020–2024. Populasi ayam ras pedaging tercatat mendominasi, dengan jumlah tertinggi mencapai 4.181.452 ekor pada tahun 2022, sebelum menurun drastis pada 2024 menjadi 334.514 ekor. Populasi ayam kampung juga mengalami fluktuasi, naik hingga 685.920 ekor pada 2022, lalu turun tajam menjadi 64.816 ekor pada 2024. Sementara itu, ayam ras petelur dan itik cenderung menurun dari tahun ke tahun, menandakan adanya tantangan dalam mempertahankan populasi unggas lokal. Secara umum, tren populasi unggas di Kutai Timur menunjukkan peningkatan hingga 2022 diikuti penurunan signifikan



setelahnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kasus penyakit hewan, tingkat kelahiran, angka kematian ternak, serta pemotongan hewan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan PD

1. Kelompok Sasaran Internal

1. Aparatur Dinas

Aparatur Dinas terdiri atas pegawai struktural dan pejabat fungsional Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan akuntabel, pengembangan aparatur menjadi faktor strategis yang harus mendapat perhatian. Oleh karena itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan menetapkan arah kebijakan pengembangan aparatur melalui:

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, manajerial, serta sertifikasi kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing.
- Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, seperti peralatan lapangan, sarana mobilitas, serta perangkat teknologi informasi pendukung kegiatan dinas.
- Penerapan sistem evaluasi dan penilaian kinerja berbasis hasil (output dan outcome) melalui mekanisme Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Indikator Kinerja Individu (IKI), serta Perjanjian Kinerja yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) secara objektif untuk mendorong peningkatan kinerja dan kedisiplinan aparatur.
- Pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi manajemen kinerja untuk mempercepat proses pelayanan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan di lingkungan dinas.

Melalui strategi tersebut, diharapkan aparatur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur memiliki kompetensi tinggi, etos kerja profesional, dan integritas dalam menjalankan tugas dan



tanggung jawabnya, sehingga mampu mendukung terwujudnya ketahanan pangan daerah, peningkatan produktivitas pertanian, serta kesejahteraan petani dan peternak secara berkelanjutan.

2. UPTD

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur meliputi UPTD Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Perkebunan. UPTD tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas teknis dinas, khususnya dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan, pengujian kesehatan hewan, serta pemberdayaan petani dan peternak melalui kegiatan penyuluhan.

2. Kelompok Sasaran Eksternal

1. Petani

Petani memerlukan pendampingan intensif melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis, serta program pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi usaha tani, dan adaptasi terhadap teknologi pertanian modern. Selain itu juga, petani membutuhkan kemudahan akses terhadap perizinan, fasilitas pembiayaan, serta perluasan akses pasar dan ekspor komoditas unggulan daerah.

2. Peternak

Peternak rakyat memerlukan pendampingan intensif melalui program seperti kemitraan sapi potong, PDKT, dan integrasi tanaman-ternak, sedangkan peternak komersial membutuhkan kemudahan perizinan, akses pembiayaan, serta dukungan ekspor. Strategi layanan dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan aktif oleh petugas medis dan paramedis, bimbingan teknis lapangan, serta kolaborasi dengan lembaga terkait untuk menjamin mutu layanan dan meningkatkan produktivitas peternak secara berkelanjutan.

3. Masyarakat/Stakeholder

Masyarakat merupakan penerima manfaat langsung dari berbagai program pembangunan di sektor pertanian dan peternakan. Masyarakat memerlukan



jaminan ketersediaan dan keamanan pangan, akses terhadap produk pertanian dan peternakan yang berkualitas.

2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan terkait dengan berbagai personal eksternal yang dihadapi. Berikut adalah tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang urusan pertanian.

1. Tantangan

Berdasarkan pada kondisi eksisting saat ini dan dampak negatif dari perkembangan ekonomi, pertumbuhan jumlah penduduk serta perubahan social dan budaya, maka tantangan potensial dalam pengelolaan sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

1. Terjadi perubahan penggunaan lahan pertanian produktif menjadi perkebunan kelapa sawit.
2. Perubahan iklim
3. Merebaknya kasus-kasus penyakit yang menyerang ternak.
4. Rendahnya Jumlah Generasi Muda Petani

2. Peluang

Berdasarkan tantangan yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Kutai Timur, berikut adalah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sektor pertanian dan peternakan Kabupaten Kutai Timur:

1. Masih tersedianya potensi peningkatan produksi tanaman pangan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan penyediaan alat mesin pertanian;
2. Permintaan komoditas hasil peternakan dan pertanian meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk;
3. ketersediaan lahan pertanian produktif yang masih cukup luas;



2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan periode jangka menengah Tahun 2025 - 2029 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode jangka menengah sebelumnya. Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun kedepan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian dan peternakan di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2025 - 2029, mencakup aspek seperti: keterbatasan infrastruktur pertanian dan peternakan yang berkelanjutan, ketimpangan akses pasar dan kelembagaan ekonomi petani/peternak yang lemah, rendahnya akses permodalan dan teknologi inovatif, dan krisis regenerasi dan rendahnya kualitas SDM pertanian dan peternakan.

Secara lebih lengkap, permasalahan utama yang dihadapi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan berdasarkan Tugas dan Fungsinya tersaji dalam tabel 3.1 berikut ini.



Tabel 16. Rumusan Permasalahan Utama, Permasalahan dan Akar Masalah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Transformasi ekonomi yang berjalan lambat dan masih sangat tergantung pada sektor pertambangan	Rendahnya kualitas dan daya saing SDM petani dan peternakan	Banyak petani dan peternak bekerja berdasarkan pengalaman tanpa akses ke pendidikan formal atau pelatihan
			Regenerasi petani dan peternak menurun karena generasi muda lebih tertarik ke sektor lain
		Belum optimalnya peningkatan kuantitas dan kualitas produksi tanaman pangan (padi dan palawija) dan hortikultura	Infrastruktur Air Bersih dan listrik serta jalan <i>on farm</i> ke market masih minim
			Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga cenderung merugikan petani
			Kurangnya permodalan untuk meningkatkan produk olahan
			Penggunaan pupuk anorganik dan pestisida secara berlebihan
		Belum optimalnya peningkatan produksi daging	Pelaksanaan mini ranch (model pengelolaan budidaya sapi ternak) belum efektif
			Kurangnya SDM (Petugas Paramedik/Petugas IB (Inseminasi Buatan) yang terampil
			Pelayanan IB (Inseminasi Buatan) terkendala jarak dan lokasi



Untuk mengidentifikasi permasalahan secara lebih mendalam, dilakukan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi akar dari permasalahan utama. Permasalahan utama yang dihadapi adalah:

1. Belum optimalnya peningkatan kuantitas dan kualitas produksi tanaman pangan (padi dan palawija) dan hortikultura

Permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

Akar Masalah 1 : Infrastruktur air bersih dan listrik serta jalan *on farm* ke market masih minim

Kondisi infrastruktur pertanian yang belum memadai, seperti irigasi yang terbatas, akses listrik yang belum merata, serta jalan produksi yang rusak atau belum terbangun, menyebabkan proses budidaya dan distribusi hasil pertanian tidak berjalan efisien. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan tingginya biaya operasional yang ditanggung petani.

Akar Masalah 2 : Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga cenderung merugikan petani

Ketergantungan petani pada pedagang pengumpul atau tengkulak menyebabkan posisi tawar petani menjadi lemah. Harga jual hasil p/anen seringkali tidak menguntungkan bagi petani, sehingga mereka kehilangan motivasi untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi.

Akar Masalah 3 : Kurangnya permodalan untuk meningkatkan produk olahan

Keterbatasan akses terhadap pembiayaan, baik melalui perbankan maupun program pemerintah, membuat petani sulit melakukan inovasi atau diversifikasi produk. Hal ini menghambat peningkatan nilai tambah dan kapasitas produksi pascapanen.



Akar Masalah 4 : Penggunaan pupuk anorganik dan pestisida secara berlebihan

Praktik budidaya yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan menyebabkan degradasi tanah, gangguan kesehatan tanaman, dan penurunan hasil dalam jangka panjang. Hal ini turut memengaruhi kualitas hasil pertanian.

2. Belum optimalnya peningkatan produksi daging

Permasalahan ini muncul karena beberapa akar masalah yang saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas program pengembangan peternakan, khususnya pada komoditas sapi potong, yaitu:

Akar Masalah 1 : Pelaksanaan mini ranch (model pengelolaan budidaya sapi ternak) belum efektif

Mini ranch yang dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pengelolaan ternak belum berjalan sesuai harapan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pendampingan teknis, manajemen pakan yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi peternak dalam sistem klaster tersebut. Akibatnya, produktivitas ternak tidak meningkat secara signifikan dan sistem belum dapat dijadikan model replikasi yang berhasil.

Akar Masalah 2 : Kurangnya SDM (Petugas Paramedik dan Petugas IB) yang terampil

Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam bidang kesehatan hewan dan teknologi reproduksi ternak, seperti inseminasi buatan (IB), masih terbatas. Hal ini menyebabkan cakupan pelayanan kesehatan ternak dan reproduksi menjadi rendah. Akibatnya, tingkat kelahiran ternak tidak optimal, dan pertumbuhan populasi ternak tidak mencapai target yang diharapkan.



Akar Masalah 3 : Pelayanan IB terkendala jarak dan lokasi

Distribusi wilayah peternakan yang tersebar dan sering kali berada di daerah terpencil menyebabkan petugas IB sulit menjangkau lokasi dengan cepat dan rutin. Kondisi geografis ini berdampak pada keterlambatan atau bahkan ketidakterlayanan permintaan IB. Akibatnya, efisiensi reproduksi ternak menurun dan berdampak langsung pada rendahnya angka kelahiran sapi.

2. Rendahnya kualitas dan daya saing SDM petani dan peternak

Permasalahan rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian dan peternakan menjadi tantangan serius dalam pembangunan sektor ini secara berkelanjutan. Beberapa akar masalah yang mempengaruhinya antara lain:

Akar Masalah 1 : Banyak petani dan peternak bekerja berdasarkan pengalaman tanpa akses ke pendidikan formal atau pelatihan

Sebagian besar petani dan peternak di daerah masih mengandalkan pengetahuan turun-temurun dalam menjalankan usaha tani dan ternaknya. Kurangnya akses terhadap pendidikan formal dan pelatihan teknis menyebabkan keterbatasan dalam adopsi teknologi baru, pemahaman tentang manajemen usaha tani/ternak modern, serta praktik-praktik yang ramah lingkungan dan efisien. Akibatnya, produktivitas dan daya saing hasil pertanian dan peternakan tetap rendah.

Akar Masalah 2 : Regenerasi petani dan peternak menurun karena generasi muda lebih tertarik ke sektor lain

Minimnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian dan peternakan menyebabkan berkurangnya jumlah tenaga kerja produktif di sektor ini. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi bahwa sektor pertanian tidak



menjanjikan dari segi ekonomi, kondisi kerja yang berat, serta kurangnya akses terhadap dukungan modal dan teknologi. Ketidaktertarikan generasi muda juga menyebabkan lambatnya inovasi dan modernisasi dalam pengelolaan usaha tani dan ternak.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau kondisi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya.

Perumusan isu strategis daerah dilakukan dengan memperhatikan perkembangan isu global, nasional, dan regional yang berpengaruh terhadap kondisi dan arah pembangunan daerah. Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan di atas, maka isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan subsektor pertanian oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu lima tahun ke depan, meliputi:



Tabel 17. Isu Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sektor Pertambangan Sektor Pertanian dan Perkebunan Sektor Perikanan Sektor Industri Pengolahan	Transformasi ekonomi yang berjalan lamban dan masih sangat tergantung pada sektor pertambangan	Pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi industri	Perkembangan Geopolitik dan Geoekonomi Global	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Implementasi dari kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru Kebijakan pengembangan industri pengolahan	Percepatan Transformasi Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Ketergantungan Barang Pokok Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur	1. Penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dan peternakan. 2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan berbasis potensi lokal melalui hilirisasi dan pengembangan industri pengolahan. 3. Penguatan kapasitas SDM petani dan peternak melalui pendidikan, pelatihan, dan



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Penguatan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata		regenerasi tenaga kerja sektor pertanian. 4. Pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung usaha tani dan ternak yang terintegrasi dan berkelanjutan. 5. Peningkatan akses petani dan peternak terhadap pembiayaan, teknologi tepat guna, dan pasar yang berkeadilan. 6. Penguatan sistem kelembagaan dan kemitraan usaha tani dan ternak



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						berbasis kelompok serta korporatisasi petani. 7. Peningkatan resiliensi sektor pertanian dan peternakan terhadap perubahan iklim dan risiko usaha melalui penguatan sistem perlindungan dan asuransi usaha tani. 8. Terjadi pengurangan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan ke sektor non pertanian (Perkebunan dan Pertambangan).



2.2.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2025 - 2029 adalah:

"Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing"

Visi yang dirumuskan oleh Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi berkelanjutan baik secara ekonomis maupun sosial. Visi tersebut merupakan suatu cita-cita besar dalam rangka membangun daerah dan masyarakat Kutai Timur agar dapat berkembang secara berkelanjutan, menghadapi tantangan zaman, dengan memanfaatkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Unsur yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan adalah Kutai Timur yang tangguh, mandiri dan berdaya saing.

2. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka pencapaian visi yang telah dirumuskan secara optimal, maka disusunlah Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan lugas namun terarah sesuai tujuan dan sasaran pembangunan. Dengan memperhatikan kondisi permasalahan, tantangan ke depan, isu strategis dan memperhitungkan peluang positif yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- **Misi 1: "Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan, Melalui Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, Cerdas serta Berprestasi."**

Upaya strategis untuk meningkatkan daya saing Kutai Timur difokuskan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia yang unggul melalui akses pendidikan, pelatihan, kesehatan, serta penguatan moral dan budaya. Masyarakat



yang cerdas, sehat, dan terampil diyakini mampu menghadapi tantangan zaman, termasuk dinamika industri dan teknologi. Pemerataan daya saing juga dilakukan dengan memastikan akses yang merata terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan guna mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan kolektif. Selain itu, pelestarian nilai budaya lokal dan pendidikan berbasis moral menjadi fondasi pembentukan karakter masyarakat yang berintegritas dan bertanggung jawab sosial. Prestasi di berbagai bidang terus didorong untuk memperkuat citra Kutai Timur sebagai daerah inovatif, berbudaya, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global.

- **Misi 2: "Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan."**

Transformasi ekonomi Kutai Timur diarahkan untuk membentuk struktur perekonomian yang lebih tangguh, mandiri, dan berkelanjutan melalui diversifikasi yang tidak lagi bergantung pada sektor ekstraktif, melainkan mengembangkan sektor-sektor produktif berbasis sumber daya lokal. Strategi hilirisasi industri diterapkan dengan mendorong pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan komoditas lokal guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif difokuskan pada penguatan sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, dan pariwisata, yang didukung oleh akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Pemanfaatan teknologi dan inovasi juga menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelaku usaha. Sektor pariwisata berbasis ekowisata dan kekayaan budaya daerah turut dikembangkan sebagai sumber peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, sehingga mendukung terciptanya perekonomian yang merata di seluruh wilayah Kutai Timur.

- **Misi 3: "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas."**

Penguatan sistem pemerintahan di Kutai Timur diarahkan untuk mewujudkan tata kelola yang kuat, responsif, dan terpercaya melalui peningkatan kapasitas aparatur sipil negara yang profesional, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Digitalisasi



layanan publik menjadi strategi utama dalam mempercepat dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas. Reformasi birokrasi difokuskan pada pelayanan yang cepat, tepat, dan bebas hambatan, serta didukung oleh ketahanan birokrasi dalam menghadapi dinamika regulasi dan tuntutan publik. Integritas menjadi landasan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mendorong transparansi anggaran, pemberantasan KKN, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Selain itu, peningkatan kesejahteraan aparatur negara turut diperhatikan guna membangun motivasi kerja dan mencegah penyimpangan, sehingga seluruh kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

- **Misi 4: "Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah dan Pemerintahan yang Berintegritas."**

Pembangunan Kutai Timur difokuskan pada penguatan fondasi daerah melalui pengembangan infrastruktur fisik dan digital secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, transportasi, listrik, air bersih, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sanitasi ditingkatkan guna membuka akses wilayah terpencil dan mendukung aktivitas sosial ekonomi. Peningkatan konektivitas antar wilayah juga diprioritaskan melalui sarana transportasi yang aman dan terjangkau serta perluasan akses pasar dan distribusi logistik. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur digital diarahkan untuk memperluas akses internet dan telekomunikasi hingga desa-desa, mendukung layanan publik berbasis teknologi seperti pendidikan daring, kesehatan digital, UMKM digital, serta penerapan e-Government. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, tetapi juga memperkuat integritas pemerintahan, didukung oleh literasi digital masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif.

- **Misi 5: "Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu dan Berkesinambungan."**

Pembangunan di Kutai Timur diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumber



daya alam yang bijak dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan hutan, lahan, dan sampah secara terpadu, pengendalian pencemaran, serta pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan biogas. Upaya ini diperkuat dengan rehabilitasi lahan, konservasi keanekaragaman hayati, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim guna menjaga ekosistem yang sehat dan produktif. Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terus didorong untuk membentuk budaya ramah lingkungan, diiringi pengawasan ketat terhadap aktivitas industri agar tidak merusak alam. Pembangunan ekonomi pun diarahkan untuk mengusung konsep hijau dengan mendorong sektor ekowisata, pertanian organik, dan industri ramah lingkungan, sehingga Kutai Timur dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa mengabaikan tanggung jawab ekologis terhadap generasi mendatang.

3. Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih

Visi dan misi memuat 50 program prioritas Kepala Daerah yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.

Tabel 18. Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih

PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH 2025 - 2029	
KUTAI TIMUR HEBAT	1.000 Beasiswa Hafidz/Hafidzah Jenjang Pelajar SD-SMP
	1.000 Rumah Layak Huni (RLH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah & Relokasi Warga Terdampak Longsor
	Program RT 250 Juta Per RT Per Tahun
	1 Desa 1 Kendaraan Mobil Operasional
	1 RT 1 Kendaraan Motor Operasional
	1 Kecamatan 1 Stadion Mini
	1 KK 1 Sertifikat Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)



PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH 2025 - 2029	
	Angkutan Bus Listrik Anak Sekolah
	ASN Hebat & Berintegritas
	Asuransi Pertanian Gagal Panen.
	Pembukaan/cetak Lahan Pertanian 100.000 Ha & Cetak Tambak 5.000 Ha
	Bantuan Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendidikan, dan Peningkatan Insentif Guru Swasta dan Penyuluh Pertanian
	Beasiswa Kutim Stimulan & Beasiswa Kutim Tuntas
	Pembangunan & Perbaikan Sarana Pendidikan & Kesehatan
	Gratis Bantuan Buku, Seragam dan Sepatu Sekolah
	Gratis Minum Susu & Makan Buah untuk Stop Stunting
	Hibah 1 Milyar untuk Yayasan Pendidikan Agama
	Insentif Da'i, Guru TK/TPA, Imam Masjid, Doja, Pendeta & Guru Minggu
	Event dan Pembinaan untuk Peningkatan Prestasi Olahraga
	Jaminan BPJS Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kurang Mampu
	Jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Rentan
	Layanan Jemput Bola Program Pendidikan Non Formal, Stop Stunting, dan Warga di Bawah Garis Kemiskinan
	Menggelar Festival Seni, Budaya & Wisata, Baik Tingkat Nasional & Internasional
	Pelatihan Keterampilan & Sertifikasi Kompetensi Siap Kerja untuk Masyarakat
	Penyerapan 50.000 Tenaga Kerja dan Perlindungan Buruh



PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH 2025 - 2029	
	Pembangunan & Peningkatan Fasilitas Pariwisata Strategis Daerah
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
DESA HEBAT	Jalan Poros Desa Mulus
	Listrik Desa Menyala 24 Jam
	1 Desa 1 Jaringan Air Bersih yang Lancar
	Akses Internet Desa Lancar dan Internet Sekolah Gratis
	Anjungan Dukcapil Mandiri (Pencetakan KK, KTP, Akta Kelahiran, Kartu BPJS Kesehatan Setiap Desa)
	Bantuan 25 Juta Permodalan UMKM Desa
	Bantuan Bibit Tanaman Buah Per Rumah Tangga untuk Penghijaun Lingkungan
	Bantuan untuk Kelompok Tani & Nelayan
	Membangun Industri Pengolahan Pisang, Nanas, Coklat/Kakao, & Karet
	Membangun Pabrik-Pabrik Hilirisasi Sawit
	Menjaga Ketersediaan Stok Pupuk Harga Terjangkau Bagi Petani Desa
	Dokter Keliling Permudah Akses Kesehatan Bagi Warga Desa & Daerah Terpencil
	Program Desa Presisi (Satu data Kutim)
	Insentif Kader Posyandu 500 Ribu Rupiah Per Bulan
	Enklave dan Perubahan Tata Ruang Bagi Wilayah yang Masih Masuk Dalam Daerah Kawasan
	Pemberdayaan, Konsultasi & Perlindungan Hukum Bagi Anak, Perempuan & Keluarga di Setiap Kecamatan
	Penangkaran Buaya Sebagai Potensi Ekonomi & Wisata
KOTA HEBAT	Semenisasi, Aspal Jalan & Gang Mulus
	Pembangunan & Revitalisasi Drainase Kota



PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH 2025 - 2029	
	Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH); Taman Tempat Bermain Anak, Ramah Disabilitas, Tempat Olahraga dan Tempat Berkumpul
	Pasar Digital
	Mall UMKM & Mall Pelayanan Publik
	Percepatan Operasional Pelabuhan Kenyamukan, Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy dan Pembangunan Bandara Sangatta

4. Keterkaitan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Daerah Terpilih dengan Tupoksi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing”, Misi yang paling selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah Misi 2, yaitu “Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan.” Misi ini menekankan pentingnya transformasi dan penguatan struktur ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi sektor-sektor unggulan, khususnya sektor pertanian, hortikultura, dan peternakan. Transformasi tersebut diwujudkan melalui diversifikasi ekonomi agar tidak bergantung pada sektor pertambangan, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian dan peternakan, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu, misi ini juga menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal, di mana sektor pertanian, hortikultura, dan peternakan menjadi motor utama penggerak ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan komoditas unggulan, pemberdayaan petani dan peternak, serta penguatan akses terhadap modal dan pasar.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan secara langsung mendukung pencapaian misi tersebut, antara lain melalui perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kepada



petani dan peternak, penyediaan benih dan bibit unggul, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani dan cetak sawah, serta fasilitasi akses terhadap teknologi dan pasar. Seluruh kegiatan tersebut menjadi landasan penting dalam mendorong peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor pertanian, hortikultura, dan peternakan, yang pada akhirnya berkontribusi nyata terhadap transformasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal sebagaimana diamanatkan dalam Misi 2.

Program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan antara lain mencakup: pembukaan atau pencetakan lahan pertanian seluas 100.000 Ha sebagai upaya perluasan areal tanam dan peningkatan kapasitas produksi; pemberian asuransi pertanian sebagai bentuk mitigasi risiko gagal panen akibat perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman; bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani sebagai langkah penguatan kelembagaan dan produktivitas petani; distribusi bibit tanaman buah per rumah tangga untuk mendukung program penghijauan berbasis partisipasi masyarakat; pembangunan industri pengolahan komoditas unggulan seperti pisang dan nanas guna mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian; serta pengendalian harga dan ketersediaan pupuk bagi petani desa untuk menjamin keberlangsungan usaha tani dan efisiensi biaya produksi.

Seluruh program tersebut sejalan dan operasional dalam kerangka tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada petani serta peternak, menyediakan benih dan bibit unggul, mengelola pembangunan sarana dan prasarana pertanian seperti cetak sawah dan jalan usaha tani, serta memfasilitasi akses petani terhadap teknologi, modal, dan pasar. Implementasi program-program prioritas tersebut tidak hanya selaras secara struktural, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi petani dan transformasi sektor pertanian menuju sistem yang produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi pembangunan daerah.



2.2.4 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Provinsi

1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029

Dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029, perlu dilakukan telaahan terhadap dokumen Renstra Kementerian Pertanian sebagai acuan kebijakan pembangunan sektor pertanian secara nasional. Telaahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan daerah sejalan dan selaras dengan prioritas pembangunan pertanian nasional dalam jangka menengah.

Sebagai tindak lanjut atas visi nasional **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** yang diterjemahkan melalui 8 (delapan) misi utama atau Asta Cita Presiden Republik Indonesia, maka Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan kontribusinya terhadap pencapaian misi-misi nasional tersebut. Secara khusus, Renstra ini berkontribusi pada pencapaian:

- Asta Cita 2: melalui penguatan kemandirian pangan daerah, peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, serta pengembangan sistem distribusi dan cadangan pangan.
- Asta Cita 2 "Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru."

a. Visi Kementerian Pertanian 2025–2029

Visi pembangunan pertanian nasional dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 mengacu pada arah pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Visi yang diusung oleh Kementerian Pertanian adalah:

“Pertanian Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan Menuju Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.”



Visi ini menggambarkan tekad untuk menjadikan sektor pertanian sebagai sektor strategis yang tidak hanya menjamin kecukupan pangan dalam negeri, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui produktivitas dan nilai tambah.

b. Misi Kementerian Pertanian

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan beberapa misi utama sebagai berikut:

1. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian di pasar domestik dan global.
3. Mendorong pertanian modern dan berbasis teknologi digital melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani.
4. Membangun sistem pertanian ramah lingkungan untuk menjawab tantangan perubahan iklim.
5. Memperkuat tata kelola pemerintahan sektor pertanian yang akuntabel, efisien, dan adaptif.

c. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Nasional

Dalam kerangka pembangunan pertanian lima tahun ke depan (2025–2029), Kementerian Pertanian menekankan beberapa kebijakan strategis yang meliputi:

1. Transformasi sistem pangan nasional menuju kedaulatan pangan.
2. Peningkatan produksi komoditas utama (padi, jagung, kedelai, hortikultura, dan ternak).
3. Pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani.
4. Pemanfaatan teknologi digital, big data, dan Internet of Things (IoT) dalam sistem pertanian (smart agriculture).
5. Peningkatan akses petani terhadap permodalan, pasar, dan asuransi pertanian.
6. Penguatan sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan data, sistem penyuluhan, dan penanggulangan dampak perubahan iklim.



d. Implikasi terhadap Renstra Perangkat Daerah

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pertanian memberikan landasan penting bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur untuk:

1. Menyelaraskan visi dan misi daerah dengan arah pembangunan sektor pertanian nasional.
2. Merumuskan tujuan dan sasaran strategis daerah yang mendukung target nasional.
3. Menentukan indikator kinerja utama (IKU) yang relevan dan terukur.
4. Menyusun program dan kegiatan prioritas daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan target Kementerian Pertanian.
5. Mengoptimalkan akses terhadap sumber daya pusat, seperti bantuan teknis, alsintan, pendampingan, hingga pembiayaan.

e. Kesesuaian Program Pusat dan Daerah

Fokus Program Kementan 2025–2029	Program Daerah yang Mendukung
Modernisasi pertanian berbasis teknologi	Fasilitasi bantuan modernisasi alsintan
Korporatisasi petani dan penguatan kelembagaan	Pemberdayaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani
Pengembangan hortikultura unggulan	Pengembangan komoditas Tanaman Hortikultura (Pisang, Nanas)
Penguatan ketahanan pangan lokal	Peningkatan produksi padi, jagung, dan ternak serta Program Peternakan Rakyat Mandiri
Mitigasi perubahan iklim	Fasilitasi Asuransi Pertanian Gagal panen

2. Telaahan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dimaksudkan untuk mengidentifikasi



keselerasan strategi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan sub sektor pertanian di tingkat provinsi dengan perencanaan pembangunan sub sektor pertanian di kabupaten Kutai Timur.

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur yang terkait dengan Visi, Misi serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2025-2029 yaitu pada misi 2 (dua) *“Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah”*, serta misi 6 (enam) yaitu *“Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.”*

Arah kebijakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk menjawab tantangan, memanfaatkan potensi serta mengantisipasi dinamika sektor Pertanian di masa mendatang. Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur 2025–2029 disusun sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2030. Adapun Arah Kebijakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu :

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura
- b. Meningkatnya daya saing dan kesejahteraan petani tanaman pangan dan hortikultura
- c. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan subsektor tanaman pangan dan hortikultura
- d. Terpenuhinya konsumsi pangan bagi masyarakat
- e. Meningkatnya Upaya Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sub sektor tanaman pangan dan hortikultura
- f. Terwujudnya Birokrasi Pemerintah yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas
- g. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur selaras dengan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi



Kalimantan Timur, khususnya dalam upaya peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Upaya Kabupaten Kutai Timur untuk meningkatkan luas tanam, menyusun rencana aksi pengembangan hortikultura, serta memberikan bantuan sarana produksi secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sebagaimana yang ditargetkan oleh pemerintah provinsi. Selain itu, kebijakan kabupaten dalam meningkatkan nilai tambah produk hortikultura dan memperluas jaringan pasar juga sejalan dengan tujuan provinsi dalam meningkatkan daya saing serta kesejahteraan petani

3. Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dimaksudkan untuk mengidentifikasi keselarasan strategi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan sub sektor peternakan di tingkat provinsi dengan perencanaan pembangunan sub sektor peternakan di kabupaten Kutai Timur.

Tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merupakan rumusan capaian jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun yang selaras dengan RPJMN 2025-2029. RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dan visi misi Gubernur Kalimantan Timur serta telah terakomodir oleh aspek ekonomi, pendapatan peternak, dan produksi komoditas . Adapaun tujuan strategis yang ditetapkan adalah **“Meningkatkan Peran Subsektor Peternakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Non-Migas dan Batubara”**.

Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur didasari pada hasil yang bersifat spesifik dan terukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan meliputi: (1) Meningkatnya pendapatan peternak; (2) Meningkatkan produksi komoditas ternak; dan (3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kepuasan masyarakat.



Arah kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk menjawab tantangan, memanfaatkan potensi serta mengantisipasi dinamika sektor peternakan di masa mendatang. Kebijakan ini mengacu pada RPJMN 2025-2029, RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dan visi misi Gubernur Kalimantan Timur. Adapun arah kebijakan yang ditetapkan meliputi:

1. Peningkatan kapasitas produksi dan produktifitas komoditas peternakan unggulan dan potensi ternak lokal
2. Peningkatan status kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner daerah
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dan kelembagaan (Peternak dan Petugas)
4. Meningkatkan ketersediaan/akses bahan baku pakan murah dan mendorong tumbuhnya pengolahan dan produksi pakan
5. Meningkatkan kemudahan dan akses pembiayaan, menciptakan lingkungan agribisnis yang kondusif
6. Mendorong sistem budidaya ternak integrasi dan mendorong alokasi kawasan peternakan
7. Mengoptimalkan hilirisasi dengan peningkatan produk peternakan berdaya saing dan peningkatan akses pasar (regional, nasional dan ekspor)
8. Kolaborasi kerjasama dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat
9. Membangun kesadaran, implementasi akuntabilitas dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

1. Produksi dan Konsumsi: Produksi lokal belum mencukupi kebutuhan, produktivitas ternak rendah, ketersediaan ternak dasar terbatas, dan tingginya harga pakan.



2. Kesehatan Hewan: Munculnya penyakit menular, lemahnya sistem surveilans, kurangnya kesadaran peternak tentang kesehatan hewan, dan pemotongan sapi betina produktif.
3. Sumber Daya Manusia (SDM): Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, minimnya regenerasi peternak, dan kurangnya minat generasi muda.
4. Infrastruktur dan Lahan: Keterbatasan lahan, kurangnya infrastruktur pendukung, dan kebutuhan pemeliharaan fasilitas.
5. Ekonomi dan Pasar: Kesulitan akses modal, pasar yang tidak stabil, rendahnya daya saing produk, dan akses pasar terbatas.
6. Kerjasama dan Kemitraan: Kurangnya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta minimnya peran swasta dan investor.
7. Akuntabilitas dan Pelayanan: Belum optimalnya sistem kesekretariatan dan kurangnya digitalisasi pelayanan.
8. Kebutuhan Koordinasi dan Sinkronisasi: Tantangan dalam koordinasi lintas daerah dan antarinstansi.
9. Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit: Masalah dalam penyediaan dan pengawasan mutu benih/bibit ternak serta pakan

Telaahan terhadap Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan adanya keselarasan yang kuat dengan arah pembangunan subsektor peternakan yang tertuang dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029. Tujuan strategis Provinsi, yaitu meningkatkan peran subsektor peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi non-migas dan batubara, sejalan dengan tujuan strategis Kabupaten Kutai Timur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor non-tambang, di mana subsektor peternakan merupakan bagian integral yang mendukung kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah.

Sasaran strategis Provinsi yang mencakup peningkatan pendapatan peternak, peningkatan produksi komoditas ternak, serta peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan masyarakat, memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran Kabupaten Kutai Timur yang berfokus pada peningkatan produksi sektor pertanian.



Hal ini tercermin dalam program dan kegiatan subsektor peternakan kabupaten yang diarahkan untuk meningkatkan populasi ternak, memperluas ketersediaan dan akses pakan, serta meningkatkan kapasitas produksi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Arah kebijakan Provinsi seperti peningkatan kapasitas produksi ternak unggulan, penguatan kesehatan hewan, peningkatan kualitas SDM peternakan, dan optimalisasi hilirisasi produk peternakan selaras dengan arah kebijakan Kabupaten Kutai Timur yang menekankan pada peningkatan populasi ternak, pengendalian dan pengawasan lalu lintas ternak, pelayanan pengobatan dan vaksinasi, serta peningkatan kualitas benih dan pakan. Sinkronisasi ini menciptakan peluang besar untuk integrasi program, khususnya dalam pengendalian penyakit hewan menular, pengembangan kawasan peternakan, penyediaan pakan murah, dan perluasan pasar hasil peternakan.

Dengan adanya keterkaitan dan sinkronisasi tersebut, pelaksanaan program subsektor peternakan di Kabupaten Kutai Timur dapat memperoleh dukungan kebijakan, pembinaan teknis, fasilitasi, dan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sinergi ini juga diharapkan dapat mempercepat pencapaian sasaran bersama, memperkuat ketahanan pangan hewani, meningkatkan kesejahteraan peternak, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2.2.5 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah

Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur mencakup sistem pusat pertumbuhan dan pelayanan dan pengembangan sistem prasarana wilayah. Sementara itu pola pemanfaatan ruang dapat dilihat berdasarkan keberadaan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya dapat dilihat dari penggunaan lahannya. Penggunaan lahan daerah terbangun meliputi lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan dan pertambangan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian terkait dengan tata ruang wilayah, sebagai berikut:



- a. Belum jelasnya tata ruang peruntukan pertanian karena masih lemahnya data lahan pertanian terutama tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- b. Perubahan penggunaan lahan pertanian tanaman pangan ke subsektor lain
- c. Belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah tertinggal.
- d. Masih lemahnya koordinasi, sinergis dan kerja sama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah swasta lembaga non pemerintah dan masyarakat, serta antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerja sama antar wilayah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.

Dalam hal menyikapi isu lingkungan tersebut maka diperlukan tiga upaya antisipasi dalam pembangunan pertanian ke depan yaitu: (1) Pengembangan dan aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, (2) Pemberdayaan lembaga penelitian, universitas dan swasta dalam menciptakan pembangunan pertanian yang ramah lingkungan dan (3) Peningkatan kapasitas, produktivitas dan efisiensi produksi yang berdampak pada penurunan biaya produksi per unit produk.

2. Telaahan Berdasarkan Lingkungan Strategis Domestik

Pembangunan pertanian pada dasarnya merupakan suatu transformasi ekosistem alam menjadi ekosistem pertanian. Dalam proses transformasi tersebut dapat terjadi berbagai dampak negatif terhadap ekosistem alam yang menimbulkan degradasi lingkungan dan penurunan kapasitas produksi pertanian sehingga aspek keberlanjutan pembangunan pertanian merupakan isu pertanian yang semakin sering diperdebatkan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Dari sudut pandang sosial dan ekonomi degradasi lingkungan dapat dirangsang oleh ketidakmerataan kesempatan usaha produktif bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga kelompok masyarakat bawah terdorong untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan mengabaikan aspek pengelolaan lingkungan yang membutuhkan sejumlah dan investasi.



Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan maka pembangunan pertanian ke depan harus menekankan aspek pemerataan dan aspek lingkungan dalam kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Dalam kaitan ini tiga upaya antisipasi yang diperlukan yaitu: (1) Mengembangkan kelembagaan usaha agribisnis yang berbasis kemitraan dalam rangka mendorong pemerataan pendapatan antar pelaku agribisnis; (2) Mengembangkan diversifikasi usaha agribisnis dan usaha agribisnis yang kurang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lahan atau non-land based agribusiness melalui pengembangan kegiatan pengolahan hasil pertanian dalam rangka meningkatkan lapangan kerja di pedesaan; dan (3) Mengaplikasikan teknologi ramah lingkungan dan menginternalkan biaya penanganan lingkungan dalam seluruh kegiatan produksi pertanian terutama di bidang pengolahan hasil pertanian dan kegiatan produksi non pertanian.



BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pangan Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 terkait dengan pembangunan pertanian dan peternakan pada Misi II (ke-2), yaitu: “ **Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan.**”.

Permendagri No. 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur yaitu : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sektor Non Tambang (M2.T2.S1)

3.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yaitu :

a. Meningkatkan produksi sektor pertanian

Pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan dan pengadaan pangan daerah yang bertumpu pada produksi komoditas tanaman pangan dengan cara meningkatkan luas tanam dan produktivitas sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian, baik tanaman pangan berupa padi dan palawija serta hortikultura. Produksi tanaman pangan dan hortikultura didukung oleh penyediaan sarana produksi pertanian baik



benih, pupuk, bahan anorganik dan perlindungan tanaman serta penanganan pasca panen yang baik

b. Meningkatnya produksi sektor peternakan

Pembangunan peternakan diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan serta terpenuhinya kebutuhan konsumsi hasil ternak dalam rangka peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan; tersedianya kesempatan kerja dan berusaha sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan; tercapainya keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Pembangunan peternakan diarahkan dalam rangka mencukupi kebutuhan daging, baik yang berasal dari ternak besar (sapi, kerbau) ternak kecil (babi, kambing, domba) maupun ternak unggas; pemenuhan kebutuhan telur dan kebutuhan susu. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan daging untuk mencukupi pangan dilakukan pengembangan kawasan peternakan, dan peningkatan layanan program inseminasi Buatan (IB).

Tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan menjadi acuan penting bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam merumuskan strategi dan menentukan arah kebijakan untuk pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Kutai Timur. Rincian tujuan, sasaran dan indikator yang spesifik bagi Dinas ini akan menjadi dasar dalam perencanaan dan implementasi program kegiatan. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada Tabel 4.1



Tabel 19. Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan											
- Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor non tambang	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sektor Non Tambang		Proporsi PDRB Sektor Non-Tambang (%) (%)	0	25,06	25,66	26,91	27,56	28,22	28,88	
		Meningkatnya produksi sektor pertanian	Produksi sektor pertanian (Ton)	136.117	139.295	146.821	152.876	164.795	177.843	192.180	
		Meningkatnya produksi sektor peternakan	Produksi Sektor Peternakan (Ton)	3.761	4.166	4.263	4.411	4.565	4.734	4.914	



3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi sesuatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu: analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

Analisis internal terdiri atas Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weakness*). **Kekuatan**, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, ketrampilan/ kemampuan, atau keuntungan. Sedangkan **Kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, ketrampilan/ kemampuan dan kapabilitas yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumber daya *financial*, kapabilitas manajemen, ketrampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

Analisis eksternal terdiri dari **Peluang** (*Opportunities*) dan **Tantangan** (*Threats*). **Peluang** dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **Tantangan** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu. Tantangan adalah rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.



Tabel 20. Analisis SWOT Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029

No	Kekuatan	No	Kelemahan	No	Peluang	No	Ancaman
1	Ketersediaan luas lahan pertanian	1	Beberapa lahan potensial belum memiliki infrastruktur penunjang (irigasi, jalan tani, gudang dll)	1	Pengembangan lahan kering dan lahan rawa untuk tanaman pangan alternatif	1	Alih fungsi lahan pertanian
2	Iklim Tropis yang mendukung penanaman sebagian besar komoditas pangan	2	Kurangnya fasilitas pascapanen dan penyimpanan	2	Ketersediaan mesin dan alat pertanian modern	2	Perubahan Iklim yang ekstrim
3	Ketersediaan Varietas Unggul	3	Program teknologi pertanian masih terbatas	3	Inovasi teknologi pertanian	3	Keterbatasan listrik dan sinyal internet
4	Tersedianya pupuk organik dan kimia	4	Sistem pemasaran produk pertanian terbatas pada skala lokal	4	Dukungan infrastruktur dan sarana pertanian	4	Serangan hama dan penyakit tanaman
5	Terdapat komoditas pertanian unggulan lokal	5	Kurangnya pemanfaatan teknologi pertanian modern	5	Peningkatan permintaan produk lokal	5	Keterbatasan Jumlah petani
6	Keberadaan Kelompok Tani mendukung pemasaran produk pertanian	6	Input produksi dan produktivitas pertanian/peternakan kurang memenuhi standar mutu	6	Potensi Ekspor	6	Persaingan pasar dengan produk daerah/negara lain yang memiliki keunggulan komparatif
7	Ketersediaan lahan dan jenis pakan ternak alami yang dimanfaatkan untuk peningkatan produksi ternak	7	Populasi, produksi dan produktivitas ternak domestik belum mencukupi permintaan pasar.	7	Tersedianya industri rumah tangga pengolahan hasil pertanian dan peternakan.	7	Keterbatasan penguasaan keterampilan, modal kerja dan pasar.



No	Kekuatan	No	Kelemahan	No	Peluang	No	Ancaman
8	Penyediaan bibit ternak unggul	8	Keterbatasan modal untuk pengembangan usaha peternakan	8	Permintaan pasar yang meningkat	8	Harga pasar tidak menentu
9	Penyusunan dalam program penyuluh pertanian sudah tersusun dengan baik	9	Masih rendahnya tingkat pendidikan petani;	9	Potensi pengembangan ternak masih tersedia, dengan ketersediaan lahan yang luas	9	Adanya pembatasan kuota pengeluaran bibit ternak dari daerah sumberbibit
10	Keberadaan POKTAN dan GAPOKTAN	10	Keterbatasan aksesibilitas petani terhadap permodalan, informasi dan teknologi;	10	Pemanfaatan limbah pakan ternak untuk pertanian	10	Adanya kasus penyakit ternak
11	Pelaksanaan penyuluhan memfasilitasi pertemuan kelompok	11	Belum berkembangnya kemitraan antara petani dengan pelaku usaha pertanian;	11	Dukungan terhadap sektor pertanian dan peternakan yang tercermin dalam kebijakan daerah	11	Perubahan iklim yang ekstrem mempengaruhi ketersediaan pakan dan kesehatan ternak
		12	Lambatnya alih teknologi dan informasi;	12	Adanya usaha untuk peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh dan petani	12	Minat di bidang pertanian masih rendah; sinergitas antara dinas teknis pertanian, penyuluhan, dan BPTP;
		13	Terbatasnya sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan;	13	Inovasi teknologi untuk peningkatan kualitas usaha pertanian dan peternakan	13	Perubahan Iklim global;
		14	Rendahnya kapasitas petani dalam aspek kewirausahaan /pemasaran;			14	Ketahanan pangan dan pertumbuhan penduduk serta urbanisasi;



No	Kekuatan	No	Kelemahan	No	Peluang	No	Ancaman
		15	Terbatasnya pengetahuan dan permodalan usaha tani			15	Inovasi IPTEK semakin kompleks dan berkelanjutan

Tabel 21. Penahapan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kapasitas petani dan peternak.	Penguatan sarana dan prasarana	Pengembangan kawasan sentra	Peningkatan daya saing produk	Penerapan sistem pertanian dan peternakan berkelanjutan
Lokasi : Tersebar di 18 Kecamatan	Lokasi : Tersebar di 18 Kecamatan	Lokasi : Tersebar di 18 Kecamatan	Lokasi : Tersebar di 18 Kecamatan	Lokasi : Tersebar di 18 Kecamatan

Pelaksanaan program pembangunan pertanian dan peternakan dilaksanakan secara bertahap selama periode perencanaan. Pada **tahap pertama (tahun 2026)**, fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kapasitas petani dan peternak melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan budidaya tanaman. Selanjutnya, pada **tahap kedua (tahun 2027)**, dilakukan penguatan sarana dan prasarana produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan seperti pembangunan jalan usaha tani, kandang, dan penyediaan pakan untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan peternakan. Pada **tahap ketiga (tahun 2028)**, pembangunan difokuskan pada pengembangan kawasan sentra pertanian dan peternakan terpadu berbasis komoditas unggulan lokal serta peningkatan produktivitas. Kemudian, pada **tahap keempat (tahun 2029)**, diarahkan pada peningkatan daya saing produk pertanian dan peternakan melalui inovasi dan hilirisasi. Terakhir, pada **tahap kelima (tahun 2030)**, pembangunan difokuskan pada penerapan sistem pertanian dan peternakan berkelanjutan berbasis teknologi



serta penguatan kelembagaan petani dan peternak dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan daerah. Seluruh tahapan kegiatan tersebut dilaksanakan secara merata di 18 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah serta memperkuat peran Dinas dalam pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan Dinas disusun secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, potensi dan permasalahan yang ada, serta kebutuhan masyarakat. Strategi dan arah kebijakan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode rencana strategis.

Strategi umum Dinas disusun untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, dengan mengacu pada kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Arah kebijakan dinas merupakan penjabaran dari strategi yang bersifat lebih operasional dan menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur dalam menjalankan Rencana Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Tujuan RPJMD, yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal (M2.T2) dan menjalankan Sasaran RPJMD yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yaitu pada sasaran (1) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sektor Non-Tambang (M2.T2.S1). Strategi dan Arah Kebijakan yang digunakan untuk mencapai Tujuan Perangkat Daerah seperti pada tabel berikut ini :



Tabel 22. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sektor Non-Tambang (M2.T2.S1)		
Indikator	Proporsi PDRB Sektor Non-Tambang		
Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian	Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Peningkatan luas tanam, panen dan produktivitas tanaman pangan	Peningkatan luas tanam dan produktivitas sektor tanaman pangan
	Produksi Sub Sektor Hortikultura	Pengembangan Tanaman Hortikultura berbasis Tematik (Komoditas Perwilayahan)	1. Menyusun Rencana Aksi Pengembangan Tanaman Hortikultura 2. Memberikan Bantuan Sarana Produksi Tanaman Hortikultura 3. Meningkatkan Nilai Tambah Produk Hortikultura (Produk Turunan) 4. Memperluas jaringan pangsa pasar produk hortikultura
Meningkatnya Produksi Sektor Peternakan	Produksi Sektor Peternakan	Pengembangan ketersediaan produksi peternakan	1. Peningkatan populasi ternak 2. Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Ternak baik dari luar maupun dalam daerah 3. Pelayanan pengobatan dan vaksinasi terhadap hewan secara terpadu



Tujuan	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sektor Non-Tambang (M2.T2.S1)		
Indikator	Proporsi PDRB Sektor Non-Tambang		
Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
			4. Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan pakan hewan sesuai dengan standar

Tabel 23. Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelaksanaan budidaya tanaman pangan berkelanjutan melalui penerapan pedoman teknis Kementan, penyusunan rencana aksi daerah, penyediaan sarana produksi, pendampingan kelompok tani, serta monitoring dan evaluasi peningkatan produktivitas setiap tahun	Memperkenalkan praktik pertanian berkelanjutan dan peningkatan kapasitas petani dan nelayan, dengan menyediakan pelatihan teknis dan akses terhadap teknologi terbaru yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi produksi.	Peningkatan luas tanam dan produktivitas sektor tanaman pangan	
2	Pelaksanaan pengembangan hortikultura unggulan daerah melalui penerapan pedoman teknis kawasan hortikultura, penyusunan rencana aksi daerah, pemberian bantuan sarana produksi, pembinaan pascapanen, serta fasilitasi perluasan akses pasar guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan setiap tahun.		1. Menyusun Rencana Aksi Pengembangan Tanaman Hortikultura 2. Memberikan Bantuan Sarana Produksi Tanaman Hortikultura	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. Meningkatkan Nilai Tambah Produk Hortikultura (Produk Turunan) 4. Memperluas jaringan pangsa pasar produk hortikultura	
3	Pelaksanaan peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui penerapan pedoman teknis pengendalian penyakit hewan, vaksinasi massal, manajemen pakan, dan perbibitan, serta pengawasan lalu lintas ternak dan meningkatkan populasi ternak setiap tahun.		1. Peningkatan populasi ternak 2. Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Ternak baik dari luar maupun dalam daerah 3. Pelayanan pengobatan dan vaksinasi terhadap hewan secara terpadu 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan pakan hewan sesuai dengan standar	



BAB IV.

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program disusun dalam kerangka strategis daerah dan nasional, serta menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Timur, khususnya di bidang pertanian dan peternakan.

Program pembangunan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan daya saing komoditas unggulan daerah. Pelaksanaan program ini mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029, dengan fokus pada penguatan sistem produksi dan pengendalian penyakit hewan.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, maka langkah – langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program pembangunan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

4.2 Uraian Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029.



Seluruh kegiatan diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan sektor pertanian dan peternakan. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menjadi dasar utama dalam mendukung pencapaian tujuan strategis dan visi pembangunan daerah di bidang pertanian terpadu dan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, maka langkah – langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam kegiatan pembangunan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

- a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
- b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
- d. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- a. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian



- b. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
- c. Kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum
- 4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**
 - a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**
 - a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- 6. Program Penyuluhan Pertanian**
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian

Program di atas dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Pencapaian masing-masing kegiatan diukur dengan indikator keluaran. Secara rinci kegiatan dari masing-masing program pembangunan lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :



Tabel 24. Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
- Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor non tambang	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sektor Non Tambang	Meningkatnya produksi sektor pertanian	MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		Proporsi PDRB Sektor Non-Tambang (%) (%)		
					Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Ton)		
					2. Produksi Komoditas Hortikultura (Ton)		
					Jumlah Produksi Padi (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah Produksi Jagung (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produksi Pisang (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produksi Nanas (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Jumlah Sarana Pertanian yang Diawasi	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	
				Luas Tanam (Hortikultura)	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan (Kelahiran IB)	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
				Jumlah Laporan Pengawasan Obat Hewan Ditingkat Pengecer	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	
					Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Populasi Ternak	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		Proporsi Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
					Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0009 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	
				Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
				Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikembangkan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum (Laporan)	3.27.03.2.04 - Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	
					Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola (Ha)	3.27.03.2.04 - Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	
					Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola (Ha)	3.27.03.2.04.0002 - Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	
					Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum (Laporan)	3.27.03.2.04.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	
				MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Luas areal bencana pertanian yang tertanggulangi	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	3.27.05.2.01.0006 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
					Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
					Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya produksi sektor peternakan	MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		Produksi Sektor Peternakan (Ton)		
					Jumlah Produksi Padi (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah Produksi Jagung (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produksi Pisang (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produksi Nanas (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Jumlah Sarana Pertanian yang Diawasi	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	
				Luas Tanam (Hortikultura)	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
				Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan (Kelahiran IB)	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
				Jumlah Laporan Pengawasan Obat Hewan Ditingkat Pengecer	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	
					Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	
				Jumlah Populasi Ternak	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		Proporsi Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
					Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0009 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	
					Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	
				Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikembangkan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum (Laporan)	3.27.03.2.04 - Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	
					Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola (Ha)	3.27.03.2.04 - Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	
					Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola (Ha)	3.27.03.2.04.0002 - Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	
					Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum (Laporan)	3.27.03.2.04.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	
			MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Jumlah hewan ternak yang mendapatkan penanganan penyakit hewan	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah SKKH dan SV yang Diterbitkan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	3.27.04.2.02.0005 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah rekomendasi surat keterangan hewan yang dikeluarkan	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
				Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Diawasi	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	
					Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	3.27.04.2.04.0007 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	
					Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
					Luas areal bencana pertanian yang tertanggulangi	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	3.27.05.2.01.0006 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN				



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
					Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	



Tabel 25. Indikasi Rencana Program Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				143.622.544.500,00		149.588.582.062,00		155.852.921.501,00		162.430.477.913,00		169.336.912.144,00		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				86.411.370.074,00		90.000.872.554,00		93.769.850.157,00		97.727.276.641,00		101.882.574.448,00		
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	70,50	86.411.370.074,00	72,00	90.000.872.554,00	73,50	93.769.850.157,00	75,00	97.727.276.641,00	76,50	101.882.574.448,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76	80		82		84		86		86			
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.400.000.000,00		1.481.585.869,00		1.700.000.000,00		1.800.000.000,00		2.200.000.000,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Disusun Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1.400.000.000,00	2	1.481.585.869,00	2	1.700.000.000,00	2	1.800.000.000,00	2	2.200.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2			2		2		2					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	5		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	6		2		2		2		2			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				500.000.000,00		450.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	6	500.000.000,00	2	450.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	500.000.000,00		
3.27.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		281.585.869,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0,00	2	281.585.869,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00		
3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				900.000.000,00		650.000.000,00		800.000.000,00		900.000.000,00		1.200.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	5	900.000.000,00	2	650.000.000,00	2	800.000.000,00	2	900.000.000,00	2	1.200.000.000,00		
3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		0,00	2	100.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				63.311.370.074,00		80.999.286.685,00		78.769.850.157,00		78.494.728.575,00		81.382.574.448,00		
Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disampaikan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	310	372	63.311.370.074,00	372	80.999.286.685,00	372	78.769.850.157,00	372	78.494.728.575,00	372	81.382.574.448,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12												
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	2				2				2			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12					12				12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1				1				1			
3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				62.711.370.074,00		80.499.286.685,00		77.769.850.157,00		76.994.728.575,00		79.882.574.448,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	310	372	62.711.370.074,00	372	80.499.286.685,00	372	77.769.850.157,00	372	76.994.728.575,00	372	79.882.574.448,00		
3.27.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.27.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		0,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				300.000.000,00		200.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	2	300.000.000,00	2	200.000.000,00	2	400.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00		
3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				300.000.000,00		100.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	300.000.000,00	1	100.000.000,00	1	400.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				200.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Jumlah laporan administrasi barang milik daerah yang telah disusun dan disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	200.000.000,00	12	150.000.000,00	12	300.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00		
3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				200.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	200.000.000,00	12	150.000.000,00	12	300.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00		
3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				500.000.000,00		600.000.000,00		800.000.000,00		1.500.000.000,00		1.700.000.000,00		
Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang telah disusun dan disampaikan tepat waktu	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)		30	500.000.000,00	20	600.000.000,00	30	800.000.000,00	30	1.500.000.000,00	30	1.700.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100			25		25		90		90			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				500.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)		30	500.000.000,00	20	300.000.000,00	30	500.000.000,00	30	500.000.000,00	30	500.000.000,00		
3.27.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		1.000.000.000,00		1.200.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100		0,00	25	300.000.000,00	25	300.000.000,00	90	1.000.000.000,00	90	1.200.000.000,00		
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.300.000.000,00		2.400.000.000,00		4.300.000.000,00		5.100.000.000,00		5.500.000.000,00		
Jumlah laporan administrasi umum yang telah disusun dan disampaikan tepat waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	4.300.000.000,00	12	2.400.000.000,00	12	4.300.000.000,00	12	5.100.000.000,00	12	5.500.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1											
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12			12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1			12		12		12		12			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.050.000.000,00		500.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	12	2.050.000.000,00	12	500.000.000,00	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00		
3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		100.000.000,00		400.000.000,00		800.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0,00	12	100.000.000,00	12	400.000.000,00	12	800.000.000,00	12	1.000.000.000,00		
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				550.000.000,00		100.000.000,00		600.000.000,00		800.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	550.000.000,00	12	100.000.000,00	12	600.000.000,00	12	800.000.000,00	12	1.000.000.000,00		
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.500.000.000,00		1.600.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	1.500.000.000,00	12	1.600.000.000,00	12	2.000.000.000,00	12	2.000.000.000,00	12	2.000.000.000,00		
3.27.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		100.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12		0,00	12	100.000.000,00	12	300.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00		
3.27.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1	200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.950.000.000,00		1.900.000.000,00		4.500.000.000,00		5.500.000.000,00		5.500.000.000,00		
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang diadakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	7	10.950.000.000,00	1	1.900.000.000,00	4	4.500.000.000,00	4	5.500.000.000,00	4	5.500.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10			17		17		25		25			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	4				1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		7		7		7		7		7			
3.27.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.500.000.000,00		1.200.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		7	1.500.000.000,00	7	1.200.000.000,00	7	1.500.000.000,00	7	1.500.000.000,00	7	1.500.000.000,00		
3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		0,00	17	500.000.000,00	17	500.000.000,00	25	1.500.000.000,00	25	1.500.000.000,00		
3.27.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000.000,00		0,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	4	7.000.000.000,00		0,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
3.27.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.450.000.000,00		200.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	7	2.450.000.000,00	1	200.000.000,00	4	1.500.000.000,00	4	1.500.000.000,00	4	1.500.000.000,00		
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.350.000.000,00		1.120.000.000,00		1.550.000.000,00		2.300.000.000,00		2.300.000.000,00		
Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang telah disusun dan disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.350.000.000,00	12	1.120.000.000,00	12	1.550.000.000,00	12	2.300.000.000,00	12	2.300.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12				12				12			12
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				550.000.000,00		420.000.000,00		650.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	550.000.000,00	12	420.000.000,00	12	650.000.000,00	12	800.000.000,00	12	800.000.000,00		
3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				800.000.000,00		700.000.000,00		900.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	800.000.000,00	12	700.000.000,00	12	900.000.000,00	12	1.500.000.000,00	12	1.500.000.000,00		
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.400.000.000,00		1.350.000.000,00		1.850.000.000,00		2.532.548.066,00		2.800.000.000,00		
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		4.400.000.000,00		1.350.000.000,00		1.850.000.000,00		2.532.548.066,00		2.800.000.000,00		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		10				30				30			50



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	8		2		2		3		5			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	30		11		30		30		30			
3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.000.000.000,00		550.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	30	1.000.000.000,00	11	550.000.000,00	30	1.000.000.000,00	30	1.000.000.000,00	30	1.000.000.000,00		
3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.27.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				400.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		10	400.000.000,00	30	300.000.000,00	30	300.000.000,00	50	800.000.000,00	50	800.000.000,00		
3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.000.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		732.548.066,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	8	3.000.000.000,00	2	500.000.000,00	2	550.000.000,00	3	732.548.066,00	5	1.000.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				35.482.421.965,00		36.956.351.166,00		38.503.976.827,00		40.128.983.770,00		41.835.241.061,00		
MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Jumlah Produksi Padi (Ton)	24.278	26.186	35.482.421.965,00	26.453	36.956.351.166,00	26.720	38.503.976.827,00	26.986	40.128.983.770,00	27.245	41.835.241.061,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	1.499	1.550		1.600		1.650		1.700		1.850			
	Produksi Pisang (Ton)	88.358	97.417		102.288		112.516		123.768		123.768			
	Produksi Nanas (Ton)	0	18.426		19.347		20.315		21.331		21.331			
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Ton)	762	437		450		480		495		495			
	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) (Ton)	2.867	3.325		3.450		3.580		3.725		3.880			
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				15.688.540.368,00		19.461.267.474,00		19.450.654.993,00		20.736.728.657,00		20.725.590.022,00		
Jumlah Sarana Pertanian yang Diawasi				15.688.540.368,00		19.461.267.474,00		19.450.654.993,00		20.736.728.657,00		20.725.590.022,00		
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	0,5	8		8		8		10		10			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				5.500.000.000,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		8.200.000.000,00		8.500.000.000,00		
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	5.500.000.000,00	1	8.000.000.000,00	1	8.000.000.000,00	1	8.200.000.000,00	1	8.500.000.000,00		
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				7.188.540.368,00		8.011.267.474,00		9.000.654.993,00		9.000.000.000,00		9.000.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1	7.188.540.368,00	1	8.011.267.474,00	1	9.000.654.993,00	1	9.000.000.000,00	1	9.000.000.000,00		
3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.536.728.657,00		1.225.590.022,00		
Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	0,5	8	1.000.000.000,00	8	1.000.000.000,00	8	1.000.000.000,00	10	1.536.728.657,00	10	1.225.590.022,00		
3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura				1.000.000.000,00		1.800.000.000,00		800.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	1	1	1.000.000.000,00	1	1.800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura				1.000.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	1	1	1.000.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				8.150.000.000,00		9.700.000.000,00		10.253.321.834,00		10.392.255.113,00		11.109.651.039,00		
Luas Tanam (Hortikultura)	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1	7.150.000.000,00	1	8.000.000.000,00	1	8.453.321.834,00	1	8.292.255.113,00	1	8.909.651.039,00		
3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				7.150.000.000,00		8.000.000.000,00		8.453.321.834,00		8.292.255.113,00		8.909.651.039,00		
Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1	7.150.000.000,00	1	8.000.000.000,00	1	8.453.321.834,00	1	8.292.255.113,00	1	8.909.651.039,00		
Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan (Kelahiran IB)	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1	1.000.000.000,00	1	1.700.000.000,00	1	1.800.000.000,00	1	2.100.000.000,00	1	2.200.000.000,00		
	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	1	0		1		1		1					
3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.100.000.000,00		
3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman				0,00		700.000.000,00		800.000.000,00		1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	1	0	0,00	1	700.000.000,00	1	800.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.100.000.000,00		
3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Jumlah Laporan Pengawasan Obat Hewan Ditingkat Pengecer	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				11.643.881.597,00		7.795.083.692,00		8.800.000.000,00		9.000.000.000,00		10.000.000.000,00		
Jumlah Populasi Ternak	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	0	4	11.643.881.597,00	2,25	7.795.083.692,00	6	8.800.000.000,00	6	9.000.000.000,00	6	10.000.000.000,00		
	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	1.467	652		570		670		700		700			
3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				800.000.000,00		370.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	0	4	800.000.000,00	2,25	370.000.000,00	6	500.000.000,00	6	500.000.000,00	6	500.000.000,00		
3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				10.843.881.597,00		7.425.083.692,00		8.300.000.000,00		8.500.000.000,00		9.500.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	1.467	652	10.843.881.597,00	570	7.425.083.692,00	670	8.300.000.000,00	700	8.500.000.000,00	700	9.500.000.000,00		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				14.469.450.993,00		15.070.507.661,00		15.701.617.163,00		16.364.282.140,00		17.060.080.366,00		
MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Proporsi Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (%)	0	65,33	14.469.450.993,00	63,73	15.070.507.661,00	62,21	15.701.617.163,00	60,77	16.364.282.140,00	60,77	17.060.080.366,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				2.000.000.000,00		1.210.000.000,00		1.400.000.000,00		1.549.718.215,00		2.350.000.000,00		
Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	112	100	2.000.000.000,00	100	1.210.000.000,00	100	1.400.000.000,00	100	1.549.718.215,00	125	2.350.000.000,00		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	2	2				0		0		1			
	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	30	30		20		30		30					
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				500.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1	500.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan				500.000.000,00		660.000.000,00		650.000.000,00		799.718.215,00		900.000.000,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	112	100	500.000.000,00	100	660.000.000,00	100	650.000.000,00	100	799.718.215,00	125	900.000.000,00		
3.27.03.2.01.0009 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan				500.000.000,00		350.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		650.000.000,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	30	30	500.000.000,00	20	350.000.000,00	30	550.000.000,00	30	550.000.000,00	30	650.000.000,00		
3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		500.000.000,00		
Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	2	2	500.000.000,00		0,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00		
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				8.369.450.993,00		13.540.507.661,00		13.751.617.163,00		14.364.563.925,00		13.860.080.366,00		
Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	5	6	8.369.450.993,00	6	13.540.507.661,00	6	13.751.617.163,00	6	14.364.563.925,00	6	13.860.080.366,00		
	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	73	80		100		100		100					



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	8	3		3		4		4		4			
	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	57	20		28		35		35		35			
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				3.569.450.993,00		5.835.382.075,00		6.075.413.601,00		6.900.000.000,00		6.410.080.366,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	57	20	3.569.450.993,00	28	5.835.382.075,00	35	6.075.413.601,00	35	6.900.000.000,00	35	6.410.080.366,00		
3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				500.000.000,00		800.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.200.000.000,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	8	3	500.000.000,00	3	800.000.000,00	4	1.000.000.000,00	4	1.000.000.000,00	4	1.200.000.000,00		
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				3.100.000.000,00		5.655.125.586,00		5.426.203.562,00		5.214.563.925,00		5.000.000.000,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	73	80	3.100.000.000,00	100	5.655.125.586,00	100	5.426.203.562,00	100	5.214.563.925,00	100	5.000.000.000,00		
3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	5	6	1.000.000.000,00	6	1.000.000.000,00	6	1.000.000.000,00	6	1.000.000.000,00	6	1.000.000.000,00		
3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
3.27.03.2.04 - Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum				4.100.000.000,00		320.000.000,00		550.000.000,00		450.000.000,00		850.000.000,00		
Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Dikembangkan	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Dikelola (Ha)	17	2	4.100.000.000,00	4	320.000.000,00	4	550.000.000,00	4	450.000.000,00	4	850.000.000,00		
	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum (Laporan)	1	0		1		1		1					
3.27.03.2.04.0002 - Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum				4.100.000.000,00		200.000.000,00		400.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		
Terkelolanya Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Dikelola (Ha)	17	2	4.100.000.000,00	4	200.000.000,00	4	400.000.000,00	4	300.000.000,00	4	500.000.000,00		
3.27.03.2.04.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum				0,00		120.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum (Laporan)	1	0	0,00	1	120.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	350.000.000,00		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				1.037.739.686,00		1.080.847.082,00		1.126.109.848,00		1.173.635.753,00		1.223.537.952,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYRAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	100	100	1.037.739.686,00	100	1.080.847.082,00	100	1.126.109.848,00	100	1.173.635.753,00	100	1.223.537.952,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				587.739.686,00		300.000.000,00		304.800.469,00		535.278.292,00		585.180.491,00		
Jumlah hewan ternak yang mendapatkan penanganan penyakit hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	5		587.739.686,00	5	300.000.000,00	5	304.800.469,00	5	535.278.292,00	5	585.180.491,00		
	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	5		5		5		5		5			
3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				0,00		150.000.000,00		154.800.469,00		300.000.000,00		336.708.087,00		
Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	5		0,00	5	150.000.000,00	5	154.800.469,00	5	300.000.000,00	5	336.708.087,00		
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				587.739.686,00		150.000.000,00		150.000.000,00		235.278.292,00		248.472.404,00		
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	5	587.739.686,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	235.278.292,00	5	248.472.404,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Jumlah SKKH dan SV yang Diterbitkan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	1		0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.27.04.2.02.0005 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	1		0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Labororium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		118.755.726,00		150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Jumlah rekomendasi surat keterangan hewan yang dikeluarkan	Jumlah Pelayanan Jasa Labororium (Laporan)	1		0,00	1	118.755.726,00	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium				0,00		118.755.726,00		150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	1		0,00	1	118.755.726,00	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				450.000.000,00		512.091.356,00		521.309.379,00		438.357.461,00		438.357.461,00		
Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Diawasi	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	25	37	450.000.000,00	15	512.091.356,00	15	521.309.379,00	15	438.357.461,00	15	438.357.461,00		
	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	8	30		30		30							



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	0	0		200		300		300		300			
3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				0,00		62.091.356,00		121.309.379,00		121.309.379,00		121.309.379,00		
Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	0	0	0,00	200	62.091.356,00	300	121.309.379,00	300	121.309.379,00	300	121.309.379,00		
3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan				150.000.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00		117.048.082,00		117.048.082,00		
Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	8	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00	30	100.000.000,00	30	117.048.082,00		117.048.082,00		
3.27.04.2.04.0007 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	25	37	300.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				2.085.537.168,00		2.172.169.759,00		2.263.133.979,00		2.358.646.410,00		2.458.934.463,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0	55,33	2.085.537.168,00	57,73	2.172.169.759,00	60,00	2.263.133.979,00	66,67	2.358.646.410,00	66,67	2.458.934.463,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				2.085.537.168,00		2.172.169.759,00		2.263.133.979,00		2.358.646.410,00		2.458.934.463,00		
Luas areal bencana pertanian yang tertanggulangi	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	0	2	2.085.537.168,00	2	2.172.169.759,00	2	2.263.133.979,00	2	2.358.646.410,00	2	2.458.934.463,00		
3.27.05.2.01.0006 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				2.085.537.168,00		2.172.169.759,00		2.263.133.979,00		2.358.646.410,00		2.458.934.463,00		
Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	0	2	2.085.537.168,00	2	2.172.169.759,00	2	2.263.133.979,00	2	2.358.646.410,00	2	2.458.934.463,00		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				4.136.024.614,00		4.307.833.840,00		4.488.233.527,00		4.677.653.199,00		4.876.543.854,00		
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	0	19,34	4.136.024.614,00	25,47	4.307.833.840,00	31,13	4.488.233.527,00	39,15	4.677.653.199,00	53,30	4.876.543.854,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				4.136.024.614,00		4.307.833.840,00		4.488.233.527,00		4.677.653.199,00		4.876.543.854,00		
Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)		41	4.136.024.614,00	54	4.307.833.840,00	66	4.488.233.527,00	83	4.677.653.199,00	113	4.876.543.854,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	359	430		450		470		470		470			
	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	0	12		12		12		12					
	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	18	18		18		18		18					
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				3.136.024.614,00		3.157.833.840,00		2.976.220.230,00		2.477.653.199,00		1.976.543.854,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	18	18	3.136.024.614,00	18	3.157.833.840,00	18	2.976.220.230,00	18	2.477.653.199,00	18	1.976.543.854,00		
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				400.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	359	430	400.000.000,00	450	300.000.000,00	470	500.000.000,00	470	600.000.000,00	470	700.000.000,00		
3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		350.000.000,00		550.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	0	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	350.000.000,00	1	550.000.000,00		
3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				500.000.000,00		650.000.000,00		812.013.297,00		1.000.000.000,00		1.200.000.000,00		
Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)		41	500.000.000,00	54	650.000.000,00	66	812.013.297,00	83	1.000.000.000,00	113	1.200.000.000,00		
3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		250.000.000,00		450.000.000,00		
Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didiseminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	0	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	250.000.000,00	12	450.000.000,00		



4.3 Program Prioritas

Dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 26. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan				
1.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
			3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	
			3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
			3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
2.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
			3.27.03.2.01.0009 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	
			3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
3.	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
			3.27.05.2.01.0006 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
4.	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
			3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
			3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
			3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	



4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi Perangkat Daerah. Selain itu sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki. Indikator kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.

Indikator kinerja merupakan tolok ukur kinerja pada target tertinggi yang menggambarkan kinerja dampak (impact) atau ultimate outcome. Indikator tujuan dan sasaran menjadi indikator kinerja utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur dalam rencana Rencana Strategis tahun 2025-2029. Adapun IKU dan target pertahun disajikan pada tabel berikut ini



Tabel 26. Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan									
2.	Produktivitas Tanaman Pangan	Ton/Ha	4,86	4,86	4,91	4,96	5,01	5,06	5,1	
3.	Produksi Komoditas Hortikultura	Ton	106.347	109.176	116.280	122.085	133.312	145.593	159.017	
4.	Produksi Komoditas Tanaman Pangan	Ton	29.772	30.120	30.542	30.792	31.484	32.250	33.163	
5.	Produksi Sektor Peternakan	Ton	3.761	4.166	4.263	4.411	4.565	4.734	4.914	



4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan yang disebut juga Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrument pengukuran kinerja penyelenggaraan yang menjadi kewenangan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 – 2029 memuat indikator yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan urusan dinas yang menjadi kewenangan dengan mengacu pada IKK outcome yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perangkat Daerah. Indikator tersebut menjadi tolok ukur penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan. Indikator Kinerja Kunci dan target Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 – 2029 disajikan pada tabel dibawah ini :



Tabel 27. Indikator Kinerja Kunci Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
2.	Peningkatan Produksi Hortikultura		Persentase	-7,23	2,66	6,51	4,75	9,19	9,21	9,22	
3.	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		Persentase	134	10,76	2,32	3,47	3,49	3,7	3,8	
4.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		Persentase	13,8	1,16	1,4	0,81	2,24	2,4	2,8	
5.	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)		%	100	100	100	100	100	100	100	



BAB V.

PENUTUP

Dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2025-2029, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan tujuan, sasaran serta kebijakan yang disusun dalam dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan 5 tahun kedepan mulai tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur sampai tahun 2029.

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur ini diharapkan dapat mendukung VISI dan MISI Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta dapat mewujudkan masyarakat terutama petani yang lebih sejahtera. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur ini diharapkan juga bermanfaat dan memacu terwujudnya administrasi pemerintahan yang baik.

Penjabaran lebih lanjut Renstra ini untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan rencana kerja tahunan. Seluruh personil dan unit kerja di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur wajib berpedoman pada Renstra ini dalam penyusunan rencana kerja yang lebih rinci. Selanjutnya Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan akan dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Seiring perkembangan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaerahan, maka Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 masih sangat memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian berdasarkan mekanisme yang berlaku. Sehingga program dan kegiatan yang dilakukan secara bertahap dapat merealisasikan sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan.



Semoga Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur dapat dilaksanakan dengan baik melalui kerja ikhlas, cerdas dan tuntas sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian program pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Sangatta, 2025

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan Kabupaten



Dyah Ratumaningrum, S.Pt,M.Si
Kepala Tk.I (IV/b)